



Seri Analisis Promosi Investasi #5

# ANALISIS PERSEPSI INVESTOR 2024



Tahun 2024

invest in



*Aceh is Open for  
Business*

# LAPORAN ANALISIS PERSEPSI INVESTOR/PELAKU USAHA 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh

Seri Analisis Promosi Investasi #5

©Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh

## **Penyunting:**

Muhammad Iswanto  
Marthunis Muhammad  
Junaidi  
Saiful Mahdi

## **Penulis:**

Saiful Mahdi  
Muhammad Shiddiq  
Nadlia Ariyati  
Mimi Salwana  
Mira Suci Yana

## **Analisis:**

Saiful Mahdi  
Muhammad Shiddiq  
Nadlia Ariyati  
Mira Suci Yana  
Abel Muhammad Agung  
Siti Adra

Banda Aceh  
Desember, 2024

**Foto Cover:** Teuku Cut Mahmud Aziz (Pon Cut)

---

# **ANALISIS PERSEPSI INVESTOR**

**Tahun 2024**

---

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>4</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	<b>5</b>
<b>BAB I - PENDAHULUAN</b>	<b>7</b>
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Data dan Metodologi	9
1.3 Sistematika Penulisan	9
<b>BAB II - STUDI PERSEPSI INVESTOR</b>	<b>11</b>
2.1 Apa itu persepsi	11
2.2 Studi Persepsi Investor	15
<b>BAB III - ACEH IS OPEN FOR BUSINESS</b>	<b>17</b>
3.1 Profil dan Tren investasi	18
3.2 Tren Investasi Aceh	23
3.3 Tata Kelola dan Kerangka Kerja Regulasi	29
3.4 SDM dan Tenaga Kerja	36
3.5 SDA dan Ketersediaan Bahan Baku	38
<b>BAB IV - ANALISIS PERSEPSI INVESTOR</b>	<b>41</b>
4.1 Indeks Daya Saing Investasi Indonesia	41
4.3 Indeks Daya Saing Investasi Aceh	46
4.3 Survei Persepsi Investor Aceh 2024	51
<b>BAB V - KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI</b>	<b>66</b>
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran	67
5.3 Rekomendasi	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>72</b>

---

# RINGKASAN EKSEKUTIF

## *Analisis Persepsi Investor/Pelaku Usaha di Aceh Tahun 2024*

Aceh memiliki potensi investasi yang besar dalam sektor agribisnis (perkebunan, perikanan), pariwisata, energi baru dan terbarukan. Pemerintah Aceh melalui DPMPTSP terus melakukan upaya peningkatan iklim investasi melalui kebijakan pro-investasi, digitalisasi layanan, pembangunan kawasan khusus, serta penguatan SDM dan infrastruktur. Studi ini hadir untuk memahami persepsi investor sebagai indikator kualitas lingkungan investasi di Aceh.

Studi ini dilakukan untuk (1) Mengukur persepsi investor terhadap tujuh aspek iklim investasi; (2) Memberikan masukan berbasis data bagi pengambil kebijakan. Studi dilakukan dengan kajian terhadap data dan informasi yang tersedia dan survei terhadap 400 perusahaan yang dipilih melalui *stratified random sampling*. Pengumpulan data dilakukan secara daring dan luring, disertai FGD multi-stakeholder. Pengukuran dilakukan menggunakan skala Likert terhadap tujuh variabel utama.

Terdapat tren peningkatan skor dari tahun 2022 ke 2024, menandakan perbaikan persepsi investor secara umum. Variabel paling positif adalah persepsi pelaku usaha terhadap *Masyarakat dan Lingkungan Sekitar* yang naik dari 77,40 menjadi 80,57; terhadap *Infrastruktur* naik dari 77,20 ke 78,38; dan terhadap *Regulasi Pemerintah* yang juga naik dari 74,80 menjadi 76,53.

Namun masih ada sejumlah tantangan menyangkut *Etos kerja SDM lokal* yang persepsinya mengalami penurunan paling besar (80,20 → 76,08), *ketimpangan akses pendidikan antara kota dan desa* masih tinggi, dan *sektor keuangan dan daya tarik produk lokal* menjadi hambatan daya saing.

Sementara itu, dalam konteks makro dan regional, indeks daya saing investasi Indonesia meningkat secara global (peringkat 27 dunia). Aceh mencatat skor di atas rata-rata nasional (3,49 vs 3,44) dan menempati peringkat ke-11 secara nasional. Kabupaten/kota paling kompetitif di Aceh dari segi iklim investasi adalah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Aceh Utara.

Untuk itu direkomendasikan agar para pemangku kepentingan (*stakeholder*) investasi di Aceh agar dapat melakukan sejumlah usaha lebih terarah pada: (1) Peningkatan Kualitas SDM melalui pelatihan vokasional, praktek industri, mendirikan *learning factory*, serta program sertifikasi teknis; (2) Penguatan Institusi Keuangan Lokal untuk mendukung pembiayaan UMKM dan investasi baru; (3) Fokus pada Infrastruktur Investasi, khususnya digitalisasi layanan dan transparansi perizinan; serta (4) Kampanye Citra Positif Aceh untuk meningkatkan eksposur Aceh dalam peta investasi nasional dan global.

---

Laporan ini menjadi acuan penting dalam merumuskan kebijakan investasi daerah. Dengan terus mengelola persepsi positif dan mengatasi hambatan strategis, Aceh memiliki peluang untuk menjadi magnet investasi baru di kawasan barat Indonesia.

---

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Indonesia telah menerapkan kebijakan investasi yang relatif terbuka dan memungkinkan investor asing untuk berinvestasi di berbagai sektor. Beberapa sektor yang menarik bagi investor asing di Indonesia antara lain pertambangan, manufaktur, energi terbarukan, infrastruktur, dan pariwisata. Saat ini, pemerintah Indonesia sedang berupaya untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia melalui berbagai reformasi dan kebijakan baru yang ditujukan untuk menarik lebih banyak investor asing ke negara ini. Salah satu inisiatif utama dalam hal ini adalah Omnibus Law yang ditujukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan reformasi investasi.

Aceh sendiri memiliki potensi investasi yang cukup besar terutama di sektor pariwisata dan energi. Pemerintah Aceh telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan iklim investasi di daerah ini dan menarik investor untuk berinvestasi di Aceh. Beberapa faktor yang dapat menarik investasi ke Aceh antara lain potensi sumber daya alam yang melimpah, infrastruktur konektivitas darat, laut, dan udara yang makin baik, serta lokasi geografis Aceh yang strategis sebagai pintu gerbang Indonesia ke kawasan Asia Tenggara, khususnya kawasan IMT-GT, dan ke kawasan Lautan India yang makin strategis karena perubahan geopolitik dan geoekonomi dunia.

Secara umum, investasi di Aceh sejauh ini belum sebesar di daerah-daerah lain di Indonesia. Namun, pemerintah Aceh dan pihak swasta telah melakukan upaya untuk meningkatkan investasi di Aceh melalui berbagai inisiatif dan proyek. Beberapa sektor yang menarik bagi investor di Aceh meliputi industri pariwisata, perikanan, perkebunan, dan pertanian. Selain itu, sektor energi juga memiliki potensi besar, terutama energi baru dan terbarukan seperti panas bumi, angin, dan energi surya. Beberapa perusahaan besar seperti perusahaan kelapa sawit Malaysia Sime Darby dan perusahaan minyak dan gas asal Turki, Zorlu Energy, telah

---

melakukan investasi di Aceh. Selain itu, beberapa perusahaan dari China, Jepang, dan Korea juga tertarik untuk berinvestasi di Aceh.

Untuk memfasilitasi investasi, pemerintah Aceh telah menetapkan berbagai insentif, seperti pengurangan dan pembebasan pajak (*tax holiday*), peningkatan infrastruktur, dan perizinan investasi yang lebih mudah. Selain itu, pemerintah Aceh juga telah membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, yang bertujuan untuk mempercepat proses perizinan dan meningkatkan ketersediaan informasi bagi investor.

Meskipun investasi di Aceh masih relatif kecil dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, Aceh memiliki potensi besar untuk menarik investasi di masa depan. Dengan memperbaiki lingkungan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Aceh dapat menjadi tujuan investasi yang menarik bagi investor dalam dan luar negeri.

Untuk meningkatkan investasi di Aceh, Rencana Strategis Investasi Aceh menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh akan menerapkan strategi berikut pada tahun 2023-2026:

1. Pengembangan infrastruktur konektivitas yang mendukung investasi berkelanjutan;
2. Pemerintah akan membangun jalan dan jembatan yang menghubungkan kawasan produktif dan memperlancar transportasi logistik. Selain itu juga akan dikembangkan infrastruktur telekomunikasi dan infrastruktur yang meningkatkan produktivitas komoditas seperti irigasi, energi dan air.
3. Digitalisasi layanan investasi;
4. Pengembangan kebijakan pro-investasi;
5. Pengembangan kawasan investasi (kawasan peruntukan investasi), yaitu Kawasan Ekonomi Khusus Arun, Kawasan Industri Aceh, Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja, dan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
6. Membangun kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh investasi dengan menggunakan strategi link and match;
7. Peningkatan industri hilir untuk komoditas prioritas berorientasi ekspor, termasuk pengolahan minyak sawit mentah;
8. Meningkatkan persepsi investor dan membangun citra yang positif;

Biasanya studi persepsi investor dibedakan dengan studi persepsi pelaku usaha. Studi persepsi investor biasa dilakukan sebuah perusahaan yang telah *go public* atau masuk bursa saham untuk memetakan persepsi investor tentang kinerja perusahaan. Harapannya, persepsi positif akan mendorong lebih banyak investor melakukan lebih banyak investasi pada perusahaan tersebut. Namun demikian, pemerintah atau pihak lainnya juga dapat melakukan studi persepsi investor/pelaku usaha untuk memetakan persepsi investor atau calon investor tentang iklim

investasi di wilayahnya. Karena itu sangatlah penting untuk mensurvei investor/perusahaan/pelaku usaha tentang persepsi mereka pada iklim investasi dan kebijakan pemerintah, niat untuk berinvestasi di masa depan, dan hambatan atau tantangan yang mereka hadapi dalam berinvestasi.

Kajian terhadap persepsi investor makin penting saat investasi telah menjadi variabel yang sangat menentukan dalam menggerakkan perekonomian suatu wilayah, baik itu dalam lingkup daerah maupun negara. Suatu negara yang mampu mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi salah satunya karena ditunjang besarnya aliran investasi ke negara yang bersangkutan. Dalam hal ini keterlibatan dunia usaha (sektor swasta) tidak lagi bersifat komplementer dalam menggerakkan kegiatan ekonomi di daerah, namun saat ini peranan sektor swasta menjadi sangat penting dan strategis.

Karena itulah studi persepsi investor/pelaku usaha ini dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh. Laporan ini adalah hasil analisis dari studi persepsi investor/pelaku usaha di Aceh yang dilakukan pada tahun 2024.

## 1.2 Data dan Metodologi

Analisis Persepsi Investor tahun 2024 merupakan bentuk meta-analisis berbasis berbagai dokumen terkait. Analisis yang dilakukan dalam studi ini berupa data primer dan sekunder yang diperoleh melalui literatur, laporan maupun dokumentasi. Data primer diperoleh lewat Survei persepsi investor 2024, dan FGD dengan sejumlah perusahaan di Aceh. Data sekunder diperoleh dari sejumlah dokumen yang berkaitan dengan investasi, jurnal dan laporan penelitian/kajian, serta data-data tentang persepsi yang terkait dengan iklim investasi di Aceh, Indonesia, dan luar Indonesia. Berbagai data kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh dianalisis secara mendalam dan dipresentasikan dalam sejumlah FGD bersama *multi-stakeholder* investasi di Aceh untuk mendapatkan konfirmasi dan pengayaan.

## 1.3 Sistematika Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam analisis ini, laporan hasil analisis ini mencoba memberikan gambaran tentang isi analisis melalui sistematika penulisan sebagai berikut:

---

## **BAB I**

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

## **BAB II**

Bab kedua, yaitu tinjauan pustaka yang berisi penelusuran kepustakaan dan literatur mengenai persepsi, studi persepsi, dan studi persepsi investor/pelaku usaha, serta bagaimana pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya di Aceh dapat memanfaatkan hasil-hasil studi sejenis untuk meningkatkan iklim investasi di Aceh;

## **BAB III**

Bab ketiga, yaitu analisis profil dan tren investasi di Aceh;

## **BAB IV**

Bab empat, yaitu analisis hasil studi persepsi investor/pelaku usaha di Aceh lewat Indeks Daya Saing, Survei Persepsi Investasi, dan analisis data lainnya. Analisis dilakukan dengan menghubungkan hasil studi dengan teori, kebijakan, dan tren yang ada di tingkat regional maupun global

## **BAB V**

Bab kelima adalah penutup. Dalam bab ini disajikan kesimpulan dan saran – saran yang merupakan rangkaian dari keseluruhan hasil kajian secara singkat mengenai objek analisis

---

# BAB II

# STUDI PERSEPSI INVESTOR

## 2.1 Apa itu persepsi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), persepsi adalah tanggapan langsung (penerimaan) terhadap rangsangan atau proses seseorang dalam memperoleh pengetahuan melalui panca indera. Dengan demikian, persepsi dapat secara ringkas didefinisikan sebagai pengalaman indrawi kita terhadap dunia. Persepsi bergantung pada mekanisme kognitif yang digunakan untuk menganalisis informasi. "Persepsi memungkinkan kita mengenali dan bereaksi terhadap rangsangan lingkungan."

Istilah "persepsi" dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin "percipere," yang berarti menerima atau mengambil. Persepsi adalah pengalaman terhadap suatu peristiwa yang diperoleh dari sintesis informasi dan pemahaman sinyal. Persepsi adalah atribusi signifikansi terhadap pengalaman indrawi kita. Dalam psikologi, persepsi adalah proses menafsirkan atau menetapkan makna pada rangsangan. Stimulus berasal dari reaksi terhadap objek, peristiwa, atau koneksi. Dalam psikologi organisasi, persepsi adalah proses di mana individu mengatur dan menafsirkan informasi sensorik untuk memperoleh makna dari lingkungan mereka. Dalam studi komunikasi, persepsi mengacu pada pengalaman objek, peristiwa, atau koneksi yang diperoleh dari menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi adalah pemberian makna pada rangsangan sensorik. Dari konsep-konsep ini dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah respons atau proses yang mengintegrasikan informasi dari kelima indra kita.

---

## Jenis Persepsi

Terdapat dua jenis persepsi, yaitu ‘persepsi objek’ dan ‘persepsi sosial’ atau persepsi terhadap manusia. Tentunya persepsi terhadap manusia lebih sulit dan kompleks, karena manusia bersifat dinamis dengan segala perbedaan karakternya.

### 1. Persepsi Objek

Persepsi objek sesuai namanya akan merespon melalui lambang-lambang fisik yang tak bergerak dan menanggapi sesuatu dari luar diri. Faktor yang mempengaruhi persepsi objek adalah latar belakang pengalaman, latar belakang budaya, latar belakang psikologis, latar belakang nilai, keyakinan, dan harapan kondisi faktual alat-alat panca indra.

### 2. Persepsi Sosial

Persepsi sosial akan merespon melalui lambang-lambang verbal dan nonverbal. Persepsi ini lebih efektif penyampaiannya, namun melibatkan banyak hal seperti perasaan, motif, harapan, dan sebagainya. Persepsi manusia atau sosial adalah proses menangkap arti kejadian-kejadian yang kita alami di lingkungan kita. Setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda mengenai realitas di sekelilingnya. Ada beberapa prinsip penting mengenai persepsi sosial yaitu:

#### a. Persepsi berdasarkan pengalaman

Merupakan persepsi manusia terhadap seseorang, objek, atau kejadian dan reaksi mereka terhadap hal-hal itu berdasarkan pengalaman masa lalu.

#### b. Persepsi bersifat selektif

Setiap manusia sering mendapatkan rangsangan indrawi. Atensi kita pada suatu rangsangan merupakan faktor utama yang menentukan sifat selektif atas rangsangan tersebut.

#### c. Persepsi bersifat dugaan

Terjadi karena data yang kita peroleh tidak lengkap sehingga proses persepsi yang bersifat dugaan ini memiliki suatu sudut pandang.

#### d. Persepsi bersifat evaluatif

Kebanyakan dari kita mengatakan bahwa apa yang kita persepsikan itu adalah suatu yang nyata, tapi sejatinya kita mungkin masih meragukan persepsi tersebut sehingga masih perlu dievaluasi.

#### e. Persepsi bersifat kontekstual

---

Maksudnya bahwa dari semua pengaruh dalam persepsi kita, konteks merupakan salah satu pengaruh yang paling kuat. Ketika kita melihat seseorang, konteks rangsangan sangat memengaruhi persepsi kita.

### 2.1.1 Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Dalam proses persepsi, banyak rangsangan yang masuk ke panca indra namun tidak semua rangsangan tersebut memiliki respon yang sama. Persepsi ditentukan oleh faktor berikut:

a. Latar Belakang Budaya

Persepsi itu terkait oleh budaya. Bagaimana kita memaknai suatu pesan, objek, atau lingkungan bergantung pada sistem nilai yang kita anut. Semakin besar perbedaan budaya antara dua orang semakin besar pula perbedaan persepsinya.

b. Pengalaman Masa Lalu

Setiap individu umumnya pernah memiliki suatu pengalaman tertentu atas objek yang dibicarakan. Makin intensif hubungan antara objek tersebut dengan audiens, maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki. Pengalaman masa lalu ini juga bisa diperkuat oleh informasi lain, seperti berita dan kejadian yang melanda objek.

c. Nilai yang Dianut

Setiap individu memiliki nilai yang dianut, mencakup kepercayaan dan kepuasan. Nilai ini berkaitan erat dengan normatif yang bersumber dari lingkungan.

### 2.1.2 Proses Terjadinya Persepsi

Ada beberapa tahapan dalam proses terjadinya persepsi pada individu, yaitu obyek menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Berikut tahapan- tahapan dalam proses terjadinya persepsi:

a. Proses Fisik atau Kealaman

Tanggapan tersebut dimulai dengan objek yang menimbulkan stimulus dan akhirnya stimulus itu mengenai alat indera atau reseptor.

b. Proses Fisiologis

Stimulus diterima oleh alat indra kemudian dilanjutkan oleh saraf sensorik ke otak.

c. Proses Psikologis

---

Proses yang terjadi dalam otak sehingga individu dapat menyadari apa yang dilihat dan didengar, sebagai suatu respon dari stimulus yang diterima.

Dalam analisis kita di sini, karenanya, persepsi investor adalah pengalaman investor/pelaku usaha tentang hal-hal dan peristiwa yang berkaitan dengan investasi dan atau usahanya di Aceh. Persepsi investor tersebut bisa berupa persepsi objek karena pengalaman bersentuhan langsung dengan investasi di Aceh atau atau persepsi manusia/sosial yang sifatnya lebih subjektif. Persepsi sosial bisa saja dimiliki oleh para investor atau calon investor yang tidak bersentuhan langsung dengan investasi di Aceh.

### 2.1.3 Mengukur Persepsi

Studi persepsi secara umum adalah usaha untuk mengukur respon individu di mana respon itu dibentuk berdasarkan pengalaman dan perasaan masing-masing. Alat yang digunakan untuk mengukur persepsi biasanya adalah kuesioner baik secara online maupun offline lewat sejumlah pertanyaan yang pilihan responnya diberikan dalam Skala Likert. Skala Likert merupakan metode pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang, biasa disebut responden, atau kelompok orang tentang fenomena sosial lewat survei kuesioner. Skala Likert adalah teknik skala non-komparatif dan unidimensional (hanya mengukur sifat tunggal) secara alami. Responden diminta untuk menunjukkan tingkat kesepakatan melalui pernyataan yang diberikan dengan cara skala ordinal. Dari dua pengertian diatas kita sudah bisa menyimpulkan bahwa skala likert merupakan metode perhitungan kuesioner yang dibagikan kepada responden untuk mengetahui skala sikap terhadap suatu objek tertentu. Skala ukur dan skor yang digunakan adalah sebagai berikut: 1 = sangat setuju (SS, bobot 5) 2 = setuju (S, bobot 4) 3 = cukup setuju (A, bobot 3) 4 = tidak setuju (TS, bobot 2) 5 = sangat tidak setuju (STS, bobot 1). Skala ukur 5 poin lainnya, tergantung pada konstruk yang hendak diukur, adalah seperti ditunjukkan Gambar 1. Terdapat juga Skala Likert dalam 7 poin. Perlu dipahami bahwa “tidak ada metode riset tunggal yang dapat menjawab semua pertanyaan kita tentang persepsi” karena setiap metode ada keterbatasannya.<sup>10</sup> Pembahasan tentang ini adalah di luar skop laporan ini.

Selain masalah keterbatasan alat ukur, ungkapan Peter Drucker di awal Bab 2 ini juga perlu menjadi perhatian: “Yang paling penting dalam komunikasi adalah mendengarkan yang tidak dikatakan”. Artinya, selain kapasitas pengetahuan, mengukur persepsi itu juga adalah masalah seni dan pengalaman. Karena itu seringkali pengukuran persepsi ini disertai dengan sejumlah Focus Group Discussion (FGD) atau diskusi kelompok terpumpun. FGD dapat dilakukan sebelum maupun sesudah pengukuran untuk memastikan sebanyak mungkin informasi dan nuansa dari responden dapat terekam.

---

## 2.2 Studi Persepsi Investor

‘Investasi’ adalah bentuk komitmen atas sejumlah dana yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Investasi dibedakan menjadi dua yaitu investasi secara langsung (*direct investment*) dan investasi tidak langsung (*indirect investment*). Investasi secara langsung merupakan keterlibatan secara langsung oleh pemodal dalam kegiatan pengelolaan modal dalam jangka panjang, sedangkan investasi tidak langsung merupakan investasi dalam jangka pendek yang dilakukan pada pasar modal dan pasar uang. Sementara ‘Investor’ adalah mereka yang melakukan investasi jangka panjang yang umumnya di atas satu tahun atau lebih. Predikat investor dapat disandang siapapun pada setiap lapisan masyarakat. Investor sendiri dibagi menjadi dua yaitu, investor individual (terdiri dari individu- individu yang melakukan aktivitas investasi) dan investor konstitusional (terdiri dari perusahaan asuransi, lembaga penyimpanan dana, lembaga dana pensiun maupun perusahaan investasi). Investasi pada dasarnya mempunyai prinsip utama yaitu menjaga keutuhan aset. Utuh dalam pengertian aman dan dapat memberikan tambahan imbal hasil yang minimal dapat mengimbangi faktor eksternal yang menyebabkan nilai aset menyusut.

Studi persepsi investor biasa dilakukan perusahaan yang telah masuk ke rantai bursa untuk mengukur persepsi investor pada kinerja perusahaan tersebut. Studi ini dapat dilakukan sendiri oleh perusahaan tersebut atau dengan melibatkan konsultan dari pihak ketiga. Banyak perusahaan besar dan multinasional yang melakukan kajian persepsi investor secara berkala. Karena itu, semakin banyak pula konsultan profesional dalam bidang ini. Namun dalam laporan ini, yang dimaksud studi persepsi investor terhadap daya tarik sebuah negara, wilayah, atau daerah. Bank Dunia dan lembaga internasional lain yang beranggotakan negara-negara di dunia biasa melakukan studi persepsi investor untuk menilai daya tarik investasi suatu negara. Respondennya adalah perusahaan, terutama perusahaan asing yang beroperasi atau berniat melakukan investasi di sebuah negara.

Studi persepsi juga bisa dilakukan pada diplomat atau perwakilan negara asing di suatu negara. Bank Dunia memiliki sejumlah modul untuk kajian sejenis seperti *Investment Climate Assessment (ICA)*, *Investment Policy and Regulatory Review (IPPR)*, dan *Investment Competitiveness Diagnostics and Research*. Terdapat pula *Investment Policy Reviews* dari UNCTAD dan OECD untuk berbagai negara anggota atau yang menjadi daya tarik anggotanya. Hasil dari berbagai kajian dan analisis tersebut memberi bukti-bukti empiris tentang pentingnya pembangunan dan pengembangan iklim investasi secara serius pada berbagai level, nasional maupun sub-nasional (provinsi, kabupaten/kota) untuk menarik investasi, terutama investasi langsung dari luar wilayah, *Foreign Direct Investment (FDI)*. Sebuah kajian, misalnya, meminta pandangan perusahaan-perusahaan di 77 negara sedang berkembang. Studi ini menemukan bahwa keterbatasan-

keterbatasan yang berkenaan dengan iklim investasi melemahkan aliran FDI. Masalah infrastruktur, keterbatasan pembiayaan, dan masalah-masalah institusional menghambat FDI. Kajian ini juga menemukan bahwa perusahaan asing yang melakukan kegiatan ekspor lebih terganggu karena masalah infrastruktur fisik dan masalah kualitas sumber daya manusia ketimbang perusahaan dengan orientasi pasar domestik. Hasil ini berlaku untuk berbagai definisi FDI itu sendiri.

Di tingkat Asia, ada juga *Asia Competitiveness Institute* (ACI) di National University of Singapore yang mengembangkan ‘indeks daya tarik investasi’.<sup>17</sup> Asia Competitiveness Institute (ACI) adalah sebuah institut penelitian di National University of Singapore yang memfokuskan pada analisis dan penelitian mengenai daya saing ekonomi di Asia. ACI didirikan pada tahun 2006 dan berfokus pada penelitian ekonomi, kebijakan publik, dan analisis komparatif mengenai daya saing di antara negara-negara Asia. Institusi ini juga berupaya untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil kebijakan, pelaku bisnis, dan masyarakat umum untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan di kawasan Asia. ACI juga sering mengadakan seminar, konferensi, dan workshop yang dihadiri oleh para ahli ekonomi, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya di bidang ekonomi dan bisnis.

ACI bertujuan untuk pengembangan pertumbuhan, standar hidup, dan tata kelola kelembagaan yang inklusif lewat kajian daya tarik investasi pada ekonomi sub-nasional di Asia. Kajian kebijakan yang dilakukan ACI bertujuan untuk mengubah kebijakan pada tingkat nasional dan subnasional demi meningkatkan iklim investasi di suatu wilayah. Kajian tentang iklim investasi di Indonesia menganalisis berbagai determinan dari FDI seperti ukuran pasar, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, risiko politik dan keamanan, korupsi, pasar tenaga kerja, bahan baku, kesiapan teknologi, inovasi, sistem keuangan, perpajakan, biaya modal, kemudahan melakukan usaha (Business Ready), dan kebijakan-kebijakan pemerintah.

---

# BAB III

## *ACEH IS OPEN FOR BUSINESS*

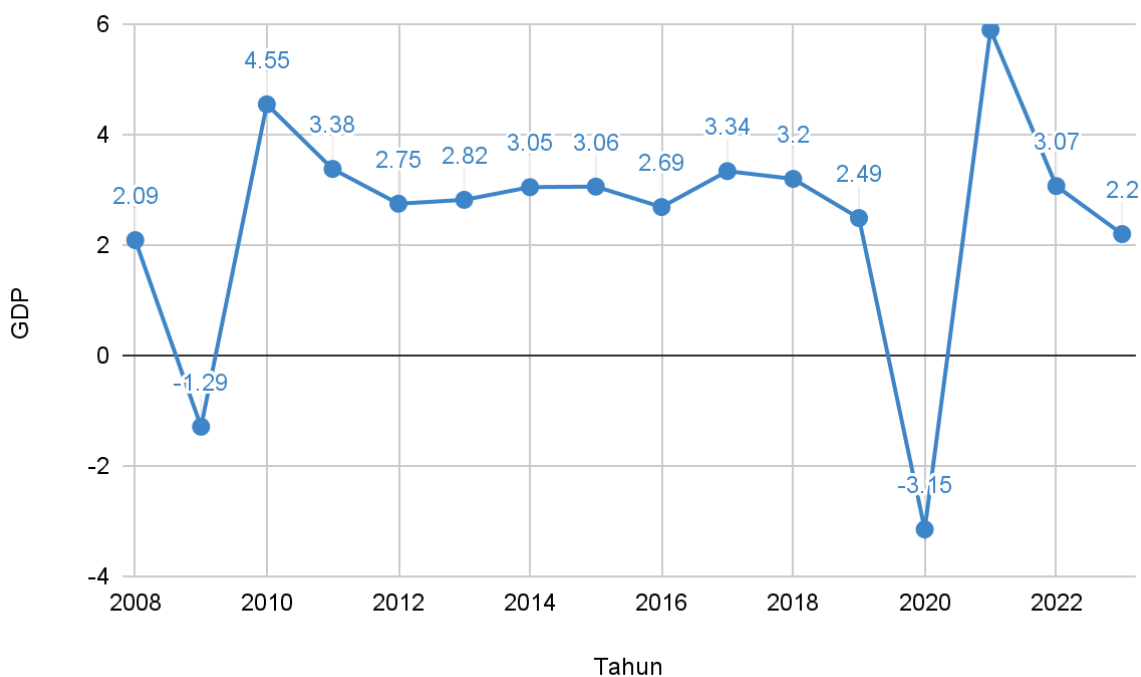
Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terbuka untuk investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment, FDI*) sejak tahun 1967. Sempat tersendat karena konflik sejak 1976 dan bencana Tsunami 2004, investasi di Aceh kembali bergeliat setelah kesepakatan damai 15 Agustus 2015 lewat MoU Helsinki antara Pemerintah RI dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Bukan hanya lewat penanaman modal dalam negeri yang sangat aktif, investasi asing pun kembali hadir di Aceh. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh mempromosikan Aceh sebagai lokasi investasi yang menarik, khususnya dalam bidang agro-industri, infrastruktur, energi baru dan terbarukan, pengembangan pariwisata, serta pengembangan kawasan. Insentif khusus, misalnya, ditawarkan kepada para investor dalam dan luar negeri untuk berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe yang menawarkan insentif pajak dan kemudahan lainnya.

*Aceh is open for business* (Aceh terbuka untuk investasi dan dunia usaha) adalah salah satu *tagline* yang diperkenalkan DPMPTSP Aceh. Ini adalah undangan sekaligus ucapan selamat datang untuk semua investor dan pelaku usaha yang hendak berinvestasi dan melakukan usaha di Aceh. Ungkapan ini tentu harus diikuti dengan fakta dan data yang mendukung dan membuat investor dan pelaku usaha yakin. Karena itu, di bagian ini akan disajikan data dan informasi tentang profil dan tren ekonomi, khususnya berkenaan dengan profil dan tren investasi di Aceh. Selanjutnya, disajikan sejumlah data dan informasi tentang beberapa determinan iklim investasi seperti tata kelola dan kerangka regulasi, SDM dan tenaga kerja, infrastruktur, akses keuangan. Belakangan, isu inklusi sosial dan kelestarian lingkungan juga makin menjadi arus utama dalam pembuatan keputusan investasi selain mantra utama yang berkaitan dengan ketersediaan bahan baku dan akses pasar.

### 3.1 Profil dan Tren investasi

Perkembangan posisi investasi Internasional (PII) Indonesia, pada akhir triwulan III 2024 mencatat bahwa kewajiban neto sebesar USD 274,0 miliar atau 19,9% dari PDB, lebih tinggi dari posisi kewajiban neto akhir triwulan II 2024 sebesar USD 249,8 miliar atau 18,3% dari PDB. Peningkatan ini dipengaruhi oleh kenaikan posisi kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN) yang melampaui peningkatan posisi Aset Finansial Luar Negeri (AFLN) (Bank Indonesia, 2024).

Perkembangan pertumbuhan PDB Global yang fluktuatif dari 2008 hingga 2023, mencerminkan dampak dari berbagai krisis ekonomi. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi global mencapai 3,1 persen, yang merupakan sekitar setengah dari pertumbuhan sebesar 5,9 persen pada tahun 2021. Di tahun 2023, pertumbuhan PDB diperkirakan akan menurun sebesar 2,2 persen, dapat dilihat pada Gambar 3.1 (Handbook of Statistic, 2023).



Sumber: UNCTAD, Handbook of Statistics, 2023

**Gambar 3.1.** Pertumbuhan PDB Riil Dunia Tahun 2008-2023

Menurut *World Economic Outlook* Dana Moneter Internasional (IMF) oktober 2024, pertumbuhan global diperkirakan akan tetap stabil pada 3,2 persen tahun 2024 dan 2025. Pertumbuhan yang kuat di Asia yang sedang berkembang diperkirakan akan melambat, dari 5,7 persen pada 2023 menjadi 5,0 persen pada 2025. Hal ini mencerminkan perlambatan di dua ekonomi terbesar di kawasan tersebut.

**Tabel 3.1.** Pertumbuhan PDB Riil berdasarkan Ekonomi Asia dan Pasifik

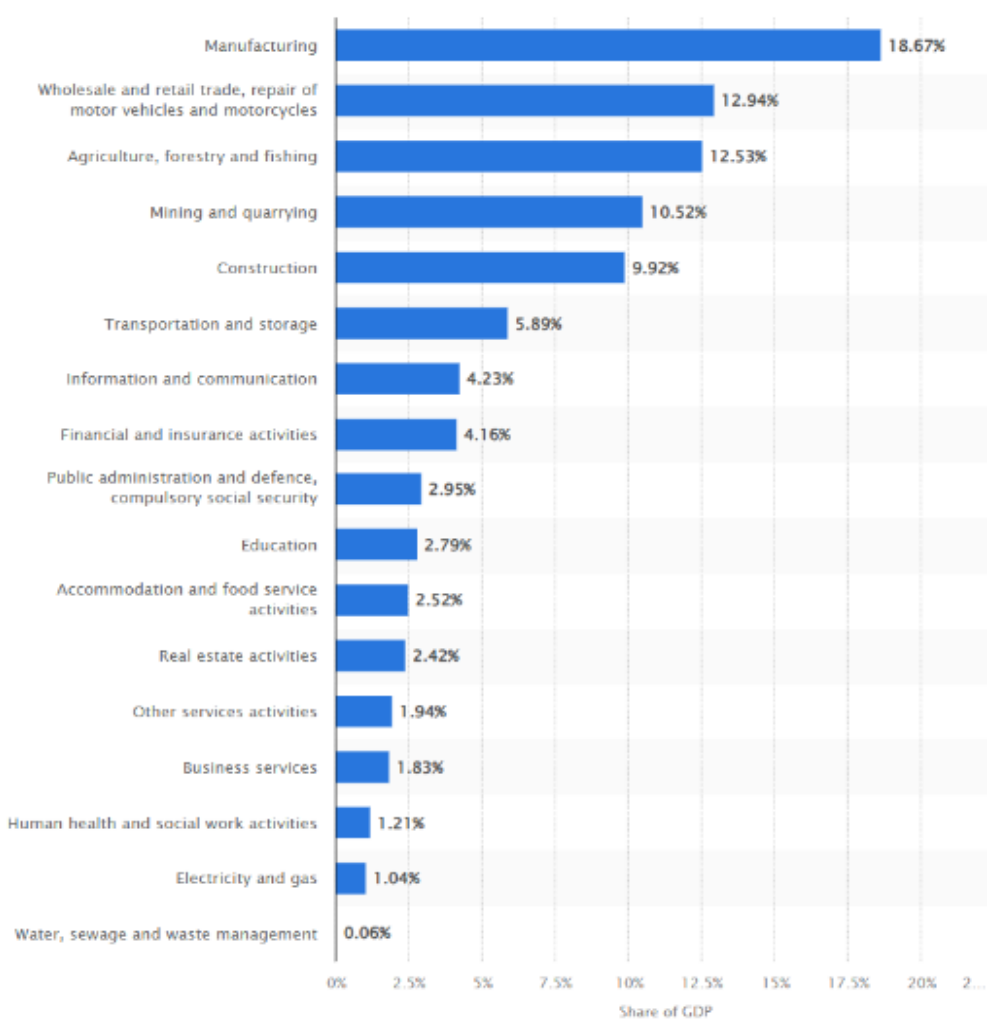
	2023	Real GDP	
		Projection	
		2024	2025
<b>Asia</b>	5.0	4.6	4.4
<b>Advanced Asia</b>	2.0	1.6	1.9
Japan	1.7	0.3	1.1
Korea	1.4	2.5	2.2
Australia	2.0	1.2	2.1
Taiwan Province of China	1.3	3.7	2.7
Singapore	1.1	2.6	2.5
Hong Kong SAR	3.3	3.2	3.0
New Zealand	0.6	0.0	1.9
Macao SAR	8.5	10.6	7.3
<b>Emerging and Developing Asia</b>	5.7	5.3	5.0
China	5.2	4.8	4.5
India	8.2	7.0	6.5
Indonesia	5.0	5.0	5.1
Thailand	1.9	2.8	3.0
Vietnam	5.0	6.1	6.1
Malaysia	3.6	4.8	4.4
Philippines	5.5	5.8	6.1
<b>Other Emerging and Developing Asia</b>	4.1	4.3	4.1
Memorandum			
ASEAN	4.0	4.5	4.5
Emerging Asia	5.8	5.4	5.1

Sumber: *World Economic Outlook*, Oktober 2024

Tabel 3.1 menunjukkan ekonomi India diproyeksikan mengalami penurunan dari 8,2 persen pada 2023 menjadi 7 persen pada 2024 dan 6,5 persen pada 2025, karena permintaan tertunda akibat pandemi, dan ekonomi kembali ke potensi normalnya. Di Tiongkok, perlambatan diperkirakan akan lebih bertahap. Meskipun sektor real estat masih lemah dan kepercayaan

konsumen rendah, pertumbuhan diperkirakan hanya melambat sedikit menjadi 4,8 persen pada 2024, sebagian besar didukung oleh kinerja ekspor yang lebih baik dari perkiraan. Langkah-langkah kebijakan terbaru mungkin menambah peluang pertumbuhan jangka pendek.

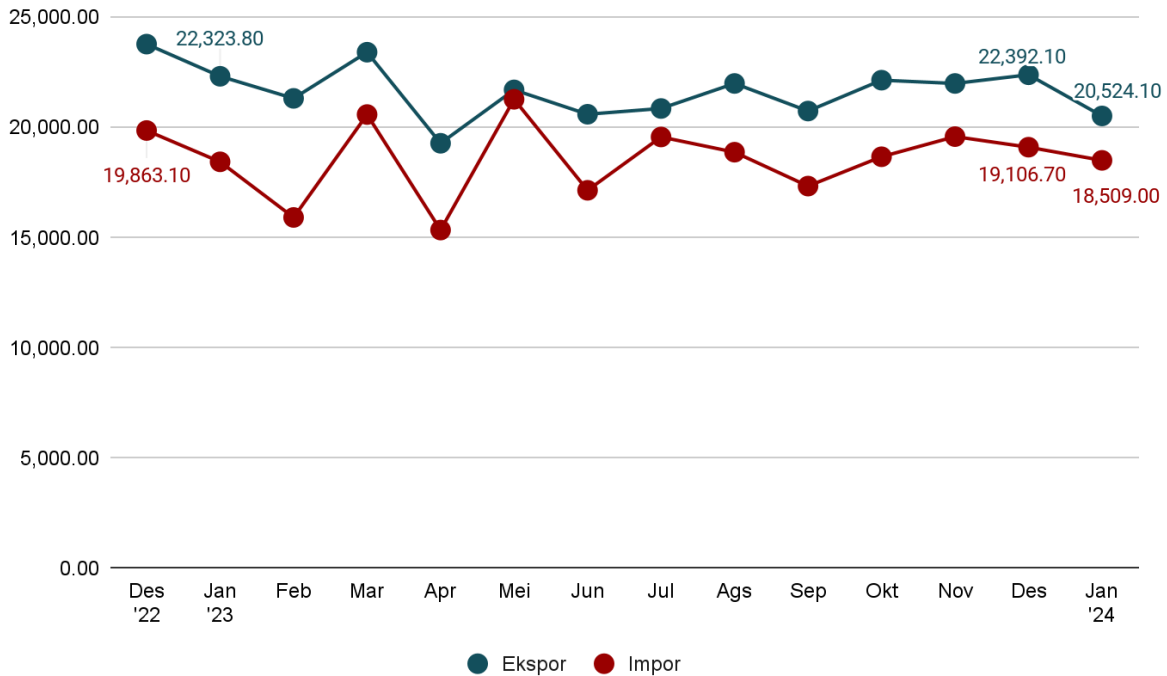
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan cukup stabil dalam beberapa tahun kedepan. Pada tahun 2023, pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 5,0 persen dan akan tetap berada di angka yang sama pada tahun 2024. Kemudian, pertumbuhan ekonomi sedikit meningkat sebesar 5.1 persen pada tahun 2025. Proyeksi ini mengindikasikan bahwa Indonesia memiliki prospek pertumbuhan yang konsisten dan relatif stabil.



Sumber: Statista, 2024

**Gambar 3.2.** PDB menurut Lapangan Usaha berdasarkan harga berlaku di Indonesia, 2023

Sektor manufaktur menjadi penyumbang terbesar terhadap PDB Indonesia dengan kontribusi sebesar 18,67%, diikuti oleh perdagangan grosir dan eceran sebesar 12,94%, dan pertanian, kehutanan, serta perikanan sebesar 12,53%. Sektor pertambangan menyumbang 10,52%, sedangkan konstruksi sebesar 9.92%. Sektor-sektor lain, seperti administrasi publik, pendidikan, akomodasi dan kegiatan real estat, memberikan kontribusi yang lebih kecil.



Sumber: BPS, 2024

**Gambar 3.2** Perkembangan Ekspor dan Impor di Indonesia Desember 2022- Desember 2023

Perkembangan ekspor Indonesia pada Januari 2024 mengalami penurunan sebesar 8,34 persen dibandingkan pada Desember 2023, yaitu dari US\$22.392,1 juta menjadi US\$20.524,1 juta. Demikian juga jika dibanding Januari 2023, ekspor turun 8,06 persen. Penurunan ekspor Januari 2024 dibanding Desember 2023 disebabkan oleh menurunnya ekspor nonmigas sebesar 8,54 persen, demikian juga ekspor migas turun 5,49 persen

Disisi lain nilai impor Indonesia Januari 2024 mencapai US\$18.509,0 juta atau turun US\$598,1 juta (3,13 persen) dibandingkan Desember 2023. Hal ini disebabkan oleh turunnya impor migas

sebesar 19,99 persen, namun impor nonmigas naik 0,48 persen. Penurunan impor migas disebabkan oleh berkurangnya impor minyak mentah, hasil minyak dan gas.

**Tabel 3.2.** Top 20 ekonomi tujuan arus masuk (*inflow*) FDI, 2022

Economy (Ranked by inflow value)	Inflows		Inward stock
	Value (Billions of \$)	Ratio to GFCF (Percentage)	Ratio to GDP (Percentage)
United States of America	285	5.8	40.9
China	189	2.5	21.1
Singapore	141	153.5	541.7
China, Hong Kong SAR	118	183.0	575.7
Brazil	86	27.9	43.6
Australia	62	15.5	42.2
Canada	53	11.1	67.7
India	49	5.1	14.7
Sweden	46	28.2	60.0
France	36	5.1	32.1
Mexico	35	13.7	45.9
Spain	35	12.2	56.2
Japan	33	2.6	5.4
Poland	29	25.4	39.2
Israel	28	27.3	46.1
United Arab Emirates	23	26.4	39.4
Indonesia	22	6.0	20.0
Italy	20	4.7	22.4
Chile	20	26.0	85.1
Korea, Republic of	18	3.1	16.3

Note: Excluding financial centres in the Caribbean (see note, table 1).

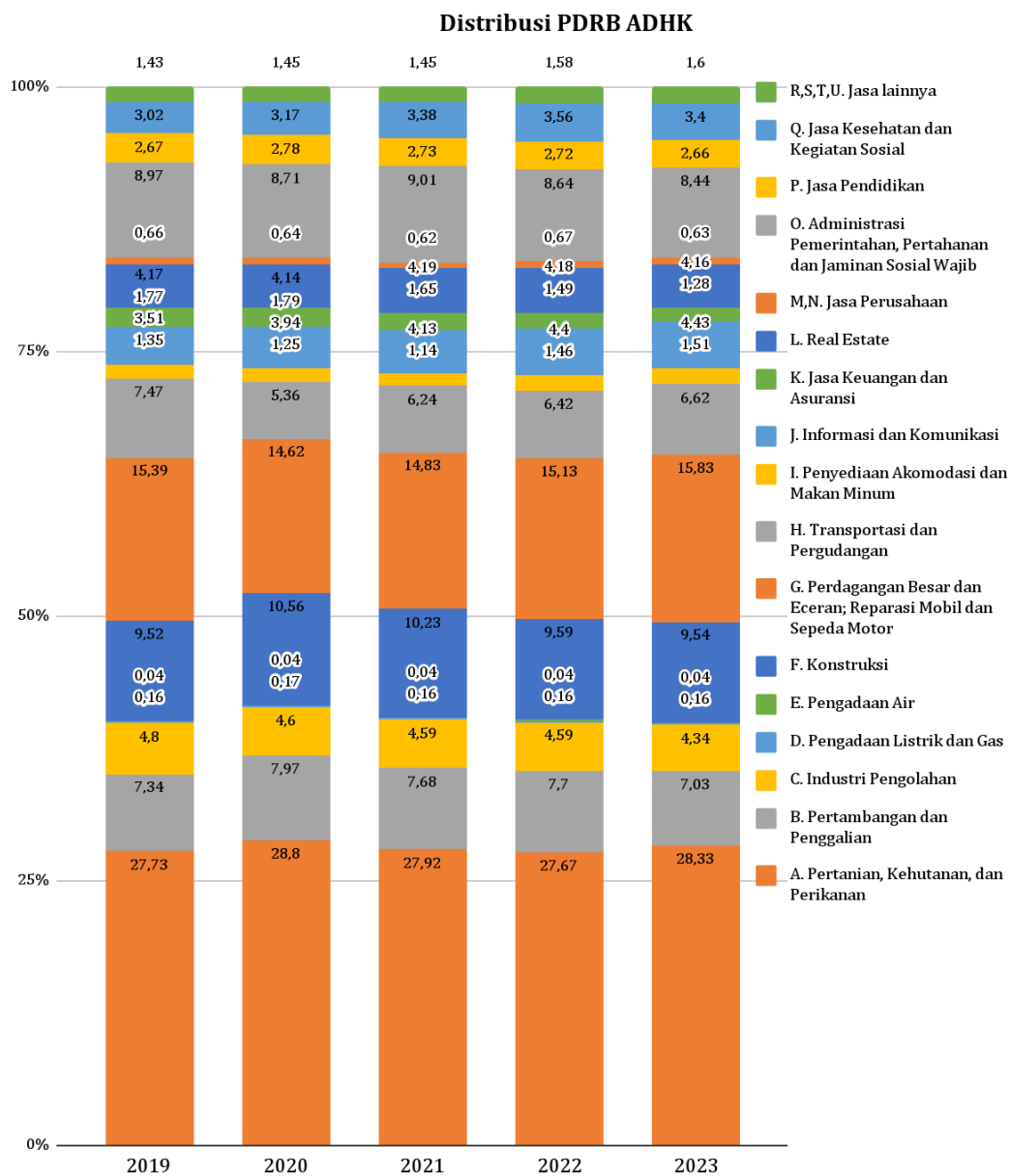
Berdasarkan Tabel 3.2 data aliran masuk investasi asing langsung (FDI) tahun 2022, Amerika Serikat menjadi tujuan utama dengan nilai inflow sebesar USD 285 miliar, diikuti oleh Tiongkok (USD 189 miliar) dan Singapura (USD 141 miliar). Singapura mencatat rasio inflow terhadap pembentukan modal tetap bruto (Gross Fixed Capital Formation/GFCF) tertinggi, yaitu 153,5%, yang menunjukkan ketergantungan signifikan terhadap FDI dalam mendukung investasi fisiknya. Sebaliknya, Indonesia mencatat inflow sebesar USD 22 miliar dengan rasio terhadap GFCF sebesar 6,0% dan rasio terhadap PDB sebesar 20,0%. Ini menunjukkan kontribusi FDI yang relatif moderat terhadap perekonomian Indonesia dibandingkan negara-negara seperti Brasil (27,9% rasio GFCF) atau Uni Emirat Arab (26,4%). Sementara itu, Hong Kong mencatat rasio inflow terhadap PDB tertinggi, yaitu 575,7%, yang mengindikasikan peran besar FDI dalam ekonominya. Secara keseluruhan, hal ini mencerminkan adanya dinamika global yang menunjukkan bahwa negara-negara dengan pasar domestik besar seperti AS dan Tiongkok menarik inflow FDI yang signifikan, sedangkan ekonomi kecil seperti Singapura dan Hong Kong sangat bergantung pada

FDI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi mereka. Di sisi lain, Indonesia memiliki ruang untuk meningkatkan kontribusi FDI terhadap pembangunan ekonominya melalui kebijakan investasi yang lebih kompetitif.

## 3.2 Tren Investasi Aceh

Secara keseluruhan, ekonomi Aceh tumbuh 4,25 persen pada tahun 2023. Jika komponen minyak dan gas dikeluarkan, perekonomian Aceh tetap tumbuh, bahkan lebih baik, yaitu tumbuh sebesar 4,91 persen. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan secara konsisten memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB dengan persentase stabil antara 27-29 persen selama periode 2019-2023 dan berkontribusi sebesar 28,33 persen pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa sektor primer masih menjadi tulang punggung utama perekonomian di Provinsi Aceh. Sektor perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor merupakan kontributor terbesar kedua, dengan proporsi sekitar 14-16 persen setiap tahunnya.

Pada tahun 2023, sektor perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor berkontribusi sebesar 15,83 persen terhadap total PDRB. Sektor ini berperan penting dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, terutama dalam konteks distribusi barang dan jasa. Sektor konstruksi berkontribusi sebesar 9,54 persen dari total PDRB pada tahun 2023. Selain itu, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib juga memberikan kontribusi stabil, sekitar 8-9 persen dari PDRB selama periode 2019-2023. Hal ini menunjukkan pentingnya peran sektor publik dan pelayanan masyarakat dalam perekonomian nasional. Secara keseluruhan, meskipun terdapat variasi kecil dalam persentase kontribusi antar sektor, namun terlihat bahwa terjadi stabilitas dalam struktur ekonomi dengan sektor-sektor utama yang tetap dominan, terutama sektor primer dan sektor perdagangan.



Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah.

**Gambar 3.3** Distribusi peran sektor perekonomian Aceh, 2019-2023

Sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan positif menunjukkan adanya peningkatan kontribusi terhadap PDRB Aceh pada tahun 2023. Sektor perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor mencatat pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 9,05 persen. Selanjutnya pertumbuhan positif terlihat pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,17 persen. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang juga mengalami pertumbuhan cukup signifikan, yaitu 6,68 persen yang menunjukkan bahwa sektor primer tetap menjadi penopang perekonomian Aceh, yang mungkin didorong oleh peningkatan produksi atau permintaan akan komoditas pertanian (**Tabel 3.3**).

Di sisi lain, sektor yang mengalami kontraksi seperti jasa keuangan dan asuransi (-10,92%) dan pertambangan dan penggalian (-4,63%) memberikan indikasi bahwa sektor-sektor ini mengalami tekanan atau tantangan. Penurunan dalam jasa keuangan dan asuransi dapat mengindikasikan perlambatan dalam aktivitas keuangan atau kurangnya investasi di sektor ini, sedangkan kontraksi pada penurunan produksi atau harga komoditas yang diekspor. Secara keseluruhan, sektor pertambangan dan penggalian menunjukkan kemungkinan adanya perekonomian Aceh tampak didorong oleh sektor jasa perdagangan, akomodasi, dan pertanian, sementara sektor keuangan dan pertambangan mengalami kendala.

Dari sisi permintaan, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh pada tahun 2023 sangat didorong oleh sektor eksternal, terutama ekspor barang dan jasa yang tumbuh sebesar 12,21 persen. Ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap barang dan jasa Aceh di pasar internasional meningkat, sehingga berkontribusi signifikan pada pertumbuhan PDRB. Impor barang dan jasa juga tumbuh sebesar 11,47 persen, yang mungkin mencerminkan peningkatan kebutuhan bahan baku atau barang modal dari luar negeri untuk mendukung aktivitas ekonomi domestik. Selain itu, pengeluaran konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) mengalami pertumbuhan sebesar 8,21 persen, yang dapat menunjukkan peran aktif lembaga non-profit dalam perekonomian, baik melalui bantuan sosial maupun kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Sementara itu, pengeluaran konsumsi pemerintah justru mengalami sedikit kontraksi, yaitu -0,12 persen. Secara keseluruhan, PDRB Provinsi Aceh tumbuh sebesar 4,23 persen pada tahun 2023, didorong terutama oleh peningkatan ekspor dan impor barang dan jasa, serta konsumsi domestik, terutama konsumsi rumah tangga dan LNPRM. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Aceh tidak hanya bergantung pada permintaan dalam negeri tetapi juga memiliki keterkaitan yang kuat dengan perdagangan internasional (**Tabel 3.4**).

**Tabel 3.3** Pertumbuhan PDRB Aceh Sisi Penawaran Tahun 2022-2023

Lapangan Usaha	Distribusi ADHK %		Laju Pertumbuhan ADHK %	
	2022	2023	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27,67	28,33	3,31	6,68
B. Pertambangan dan Penggalian	7,7	7,03	4,30	-4,63
C. Industri Pengolahan	4,59	4,34	4,19	-1,56
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,16	0,16	2,44	7,32
E. Pengadaan Air	0,04	0,04	9,83	3,53
F. Konstruksi	9,59	9,54	-2,36	3,77
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,13	15,83	6,36	9,05
H. Transportasi dan Pergudangan	6,42	6,62	7,24	7,49
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,46	1,51	32,54	8,17
J. Informasi dan Komunikasi	4,4	4,43	11,25	4,85
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,49	1,28	-5,93	-10,92
L. Real Estate	4,18	4,16	3,98	3,65
M,N. Jasa Perusahaan	0,67	0,63	11,56	-1,04
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,64	8,44	-0,06	1,84
P. Jasa Pendidikan	2,72	2,66	3,83	1,82
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,56	3,4	9,81	-0,42
R,S,T,U. Jasa lainnya	1,58	1,6	13,59	5,65
Produk Domestik Regional Bruto	100	100	4,21	4,25
PDRB Nonmigas	95,34	95,97	3,82	4,91

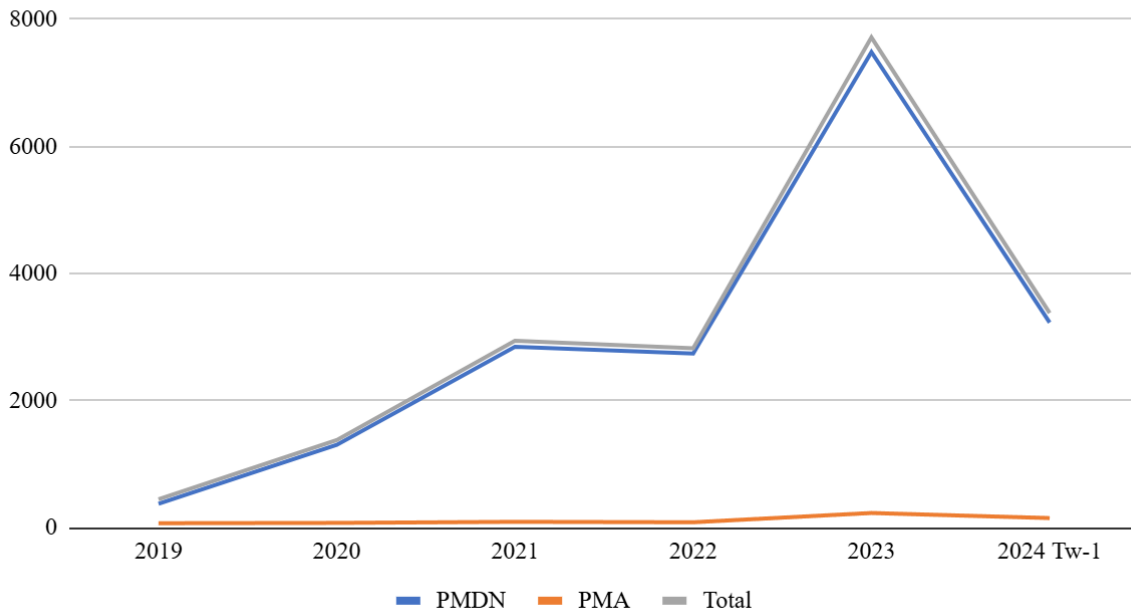
**Tabel 3.4** Pertumbuhan PDRB Aceh Sisi Permintaan Tahun 2022-2023

Komponen Pengeluaran	PDRB ADHK		Laju Pertumbuhan	
	2022	2023	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	76.318.526,83	79.428.836,99	2,96	4,08
Pengeluaran Konsumsi LNPR	2.629.601,48	2.845.434,43	5,13	8,21
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	22.319.770,12	22.293.138,13	-1,93	-0,12
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.490.355,05	47.544.761,46	-1,18	5,88
Perubahan Inventori	154.442,36	285.648,76	-	-
Ekspor Barang dan Jasa	68.411.604,55	76.764.497,57	24,53	12,21
Impor Barang dan Jasa	73.765.785,02	82.229.895,24	14,24	11,47
PDRB	140.971.715,37	146.932.422,11	4,21	4,23

Sumber: BPS; PDRB Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Pengeluaran

Berdasarkan **Gambar 3.4**, jumlah proyek penanaman modal menunjukkan tren peningkatan baik untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Aceh dari tahun 2019 hingga Triwulan 1 tahun 2024. Jumlah proyek PMDN mengalami kenaikan signifikan, dari 376 proyek pada tahun 2019 menjadi 7.484 proyek pada tahun 2023, dengan jumlah proyek mencapai 3.228 pada Triwulan 1 tahun 2024. Di sisi lain, proyek PMA juga menunjukkan peningkatan, meskipun lebih rendah dibandingkan PMDN, yaitu dari 70 proyek pada tahun 2019 menjadi 231 proyek pada tahun 2023, dan mencapai 151 proyek pada Triwulan 1 tahun 2024. Secara keseluruhan, total proyek terus bertambah setiap tahun, dengan lonjakan dari 446 proyek pada 2019 menjadi 7.715 proyek pada tahun 2023. Pada Triwulan 1 tahun 2024, total proyek yang tercatat adalah 3.379. Peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan investasi yang kuat, baik dari dalam negeri maupun asing, yang terus berlanjut hingga awal 2024.

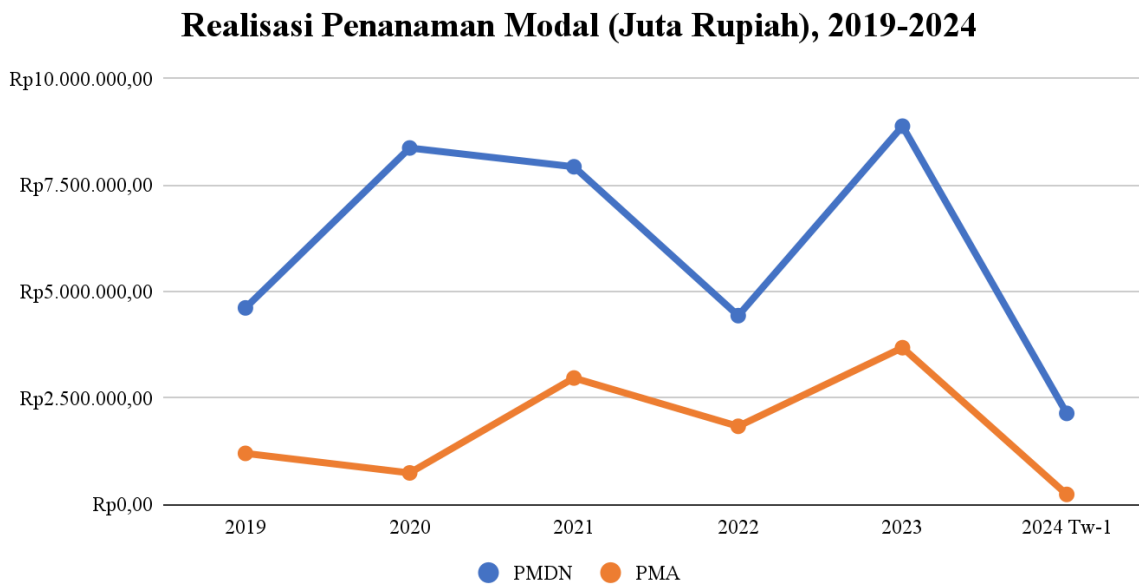
**Tren Jumlah Proyek di Aceh, 2019-2024**



Sumber: DPMPTSP, 2024

**Gambar 3.4** Tren jumlah proyek di Aceh, 2019-2024

Sementara itu, **Gambar 3.5** menunjukkan realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) di Provinsi Aceh dalam periode 2019 hingga Triwulan 1 tahun 2024. Secara umum, realisasi modal PMDN dan PMA mengalami fluktuasi selama periode ini. Pada tahun 2019, realisasi PMDN mencapai sekitar Rp4,6 triliun, sementara PMA hanya Rp1,2 triliun. Jumlah ini meningkat tajam pada tahun 2020 dengan realisasi PMDN sekitar Rp8,3 triliun, meskipun PMA turun menjadi sekitar Rp 737 miliar. Pada tahun 2021, PMDN dan PMA mengalami sedikit penurunan, dan kembali mengalami fluktuasi pada tahun 2022 dan 2023. Realisasi PMDN mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan Rp8,9 triliun, sementara PMA mencapai puncaknya pada Rp3,6 triliun pada tahun yang sama.



Sumber: DPMPTSP, 2024

**Gambar 3.5** Tren realisasi penanaman modal (PMDN dan PMA) di Aceh, 2019-2024

Jika dikaitkan dengan jumlah proyek, terlihat bahwa meskipun jumlah perusahaan terus meningkat, fluktuasi dalam nilai realisasi investasi menunjukkan adanya variasi dalam besaran modal yang diinvestasikan oleh masing-masing proyek setiap tahunnya. Tren peningkatan jumlah proyek, baik PMDN maupun PMA, tampaknya tidak selalu sejalan dengan tren peningkatan nilai realisasi modal, yang lebih dipengaruhi oleh besarnya modal yang dibawa setiap proyek pada tahun tersebut. Pada Triwulan 1 tahun 2024, realisasi modal untuk PMDN tercatat sekitar Rp2,1 triliun dan PMA Rp232 miliar, yang menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan nilai puncak pada 2023.

---

## 3.3 Tata Kelola dan Kerangka Kerja Regulasi

### 3.3.1 Tata Kelola dan Kerangka Kerja Regulasi di Indonesia

Indonesia telah membuat langkah signifikan dalam menciptakan lingkungan regulasi yang lebih transparan dan ramah bagi investor. Lanskap tata kelola investasi dicirikan oleh fasilitasi terpusat melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)—sekarang di bawah Kementerian Investasi—dan reformasi hukum progresif yang bertujuan untuk meningkatkan investasi langsung domestik dan asing (FDI).

#### 1. Kerangka Hukum dan Institusional

##### a. Undang-Undang Utama: Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Ini adalah regulasi dasar yang mengatur semua investasi di Indonesia. Ini menjamin: (1) Perlakuan yang sama untuk investor domestik dan asing; (2) Kepastian hukum, keamanan bisnis, dan perlindungan; (3) Hak untuk mentransfer dan merepatriasi keuntungan. Ketentuan utama dari undang-undang ini adalah bahwa undang-undang ini memungkinkan kepemilikan asing hingga 100% di banyak sektor, tetapi dengan pembatasan berdasarkan Daftar Investasi Positif.

##### b. Undang-Undang Cipta Kerja (Undang-Undang No. 11/2020, diperbarui 2023)

Undang-undang ini mengkonsolidasikan dan mengubah lebih dari 70 undang-undang yang ada untuk menyederhanakan proses bisnis dan investasi. Undang-undang tersebut menghilangkan tumpang tindih lisensi sektoral, menyederhanakan persyaratan perencanaan lingkungan dan spasial, serta memperkenalkan pemberian lisensi bisnis berbasis risiko melalui OSS-RBA (One Single Submission - Risk-Based Approach).

#### 2. Tata Kelola dan Lembaga Utama

a. Kementerian Investasi/BKPM adalah lembaga utama untuk persetujuan investasi, perizinan, dan fasilitasi. Mengoperasikan platform OSS-RBA untuk pemberian lisensi yang disederhanakan dan mempromosikan proyek investasi strategis serta mengelola keluhan para investor.

b. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi investasi di sektor keuangan, termasuk pasar modal dan asuransi, serta mengeluarkan regulasi untuk memastikan transparansi, kehati-hatian, dan perlindungan investor.

c. Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral Indonesia yang mengatur aliran devisa dan masuknya modal, termasuk untuk tujuan investasi. Juga mengoordinasikan kebijakan moneter dan regulasi makroprudensial terkait investasi.

### 3. Lisensi dan Fasilitasi Investasi

a. Platform OSS-RBA: Diluncurkan pada tahun 2021 dan ditingkatkan pada tahun 2023, platform ini menggunakan klasifikasi berbasis risiko (rendah, menengah, tinggi) untuk menetapkan persyaratan lisensi. Diharapkan penggunaan platform ini dapat mengurangi waktu perizinan lebih dari 60%. Platform tersebut terintegrasi dengan sistem pajak, bea cukai, dan pemerintah lokal.

b. Daftar Investasi Positif (Peraturan Presiden No. 10/2021): Regulasi ini menggantikan Daftar Investasi Negatif. Regulasi ini mengklasifikasikan sektor-sektor menjadi: (1) Sektor prioritas (insentif pajak, lisensi yang disederhanakan); (2) Sektor terbuka secara bersyarat (tergantung pada batasan kemitraan atau modal); (3) Sektor tertutup (misalnya, narkoba, perdagangan spesies yang terancam punah).

### 4. Insentif dan Perlindungan untuk Investor

Indonesia menawarkan periode keringanan pajak (*tax holiday*) hingga 20 tahun untuk sektor-sektor strategis seperti pertambangan hilir, petrokimia, dan energi terbarukan. Juga menawarkan pengurangan pajak (*tax allowance*) hingga sebesar 30% dari investasi selama 6 tahun plus penyusutan dipercepat. Selain itu, Indonesia menawarkan pengecualian bea masuk (*import duty exemptions*) untuk barang modal dan bahan baku, serta perjanjian investasi bilateral (Bilateral Investment Treaties, BITs) yang jumlahnya lebih dari 60 perjanjian. BITs ini menawarkan perlindungan seperti perlakuan yang adil dan setara serta mekanisme penyelesaian sengketa antara investor dan negara.

### 5. Penyelesaian Sengketa dan Kepastian Hukum

Indonesia adalah bagian dari ICSID (*International Centre for Settlement of Investment Disputes* atau Pusat Internasional untuk Penyelesaian Sengketa Investasi). Di tingkat nasional, sengketa lokal juga dapat diselesaikan melalui arbitrase melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). Sementara itu, Satuan Tugas Peringatan Investasi (*Investment Alert Task Force*) berusaha mengatasi dan mencegah investasi ilegal dan skema Ponzi.

### 6. Penyesuaian Internasional dan Regional

a. Tinjauan Kebijakan Investasi OECD (OECD Investment Policy Reviews): Indonesia berpartisipasi dalam tinjauan OECD untuk membandingkan kebijakannya. Rekomendasi terbaru berfokus pada meningkatkan transparansi dan menegakkan kontrak.

b. Perjanjian Investasi Komprehensif ASEAN (*ASEAN Comprehensive Investment Agreement, ACIA*): Negara-negara anggota ASEAN memberikan perlakuan nasional dan status *most-favored-nation* (MFN) kepada para investor ASEAN dan mempromosikan harmonisasi standar di seluruh wilayah kerjasama ASEAN.

Selanjutnya, terdapat sejumlah tantangan dan reformasi terbaru (2023–2024) yang perlu menjadi catatan pelaku usaha/investor di Indonesia. Misalnya, telah ada tinjauan yudisial (*judicial review, JR*) terhadap Undang-Undang Omnibus, di mana Mahkamah Konstitusi memerintahkan tinjauan ulang untuk partisipasi publik yang lebih baik. Telah terjadi juga ketegangan desentralisasi di mana beberapa pemerintah daerah menolak sistem perizinan terpusat. Di sisi lain, telah ada dorongan menuju keberlanjutan dengan pengenalan taksonomi hijau baru dan sistem evaluasi proyek berbasis ESG untuk proyek investasi.

Berdasarkan model tatakelola dan kerangka kerja regulasi seperti yang diuraikan di atas, berikut adalah matriks Risiko Investasi vs. Daya Tarik Sektor untuk Indonesia (2024):



Sumber: diolah dari berbagai sumber

**Gambar 3.6** Matriks Risiko Investasi vs. Daya Tarik Sektor Penanaman Modal Indonesia, 2024

Bagian atas kanan pada matriks dalam Gambar 3.6 menunjukkan sektor yang mempunyai risiko rendah namun daya tariknya tinggi. Termasuk dalam sektor ini adalah energi terbarukan, kesehatan, telekomunikasi dan bisnis digital serta layanan keuangan. Sektor-sektor ini menarik dan relatif berisiko rendah. Selanjutnya ada sektor dengan risiko tinggi dan daya tarik tinggi seperti pertambangan dan pariwisata. Sektor ini mempunyai potensi imbal hasil tinggi tetapi risiko regulasi atau operasional yang lebih besar. Di zona sedang adalah sektor manufaktur, ritel, dan pertanian. Peluang di sektor ini adalah cukup wajar dengan tantangan sedang. Sementara sektor properti masuk dalam kuadran yang perlu kehati-hatian. Pada sektor ini risiko lebih tinggi dengan daya tarik yang hanya sedang.

Matriks Risiko Investasi vs. Daya Tarik Sektor yang diberikan di atas adalah visualisasi sintesis berdasarkan berbagai sumber resmi dan semi-resmi yang mencerminkan perkembangan terbaru dalam lanskap regulasi, makroekonomi, dan sektoral Indonesia pada tahun 2023–2024. Sebagai sumber referensi utama adalah Kementerian Investasi / BKPM untuk analisis Sektor Prioritas Investasi Indonesia dan Tingkat Risiko Perizinan. BKPM memberikan klasifikasi sektor di bawah Daftar Investasi Positif. Platform OSS-RBA menunjukkan kerangka Lisensi Bisnis Berbasis Risiko yang menunjukkan sektor mana yang diklasifikasikan sebagai risiko rendah, menengah, atau tinggi di bawah Pendekatan Berbasis Risiko OSS. Sementara itu OECD (2023) membuat Tinjauan Kebijakan Investasi OECD tentang Indonesia yang menawarkan analisis spesifik sektor tentang hambatan regulasi, sentimen investor, dan kualitas tata kelola. Terdapat juga Laporan Investasi ASEAN 2023 yang menilai daya saing dan daya tarik regional dalam sektor-sektor kunci (misalnya, digital, kesehatan, pariwisata). Bank Dunia & IFC membuat laporan *Doing Business Indonesia 2023* yang memberikan indikator untuk memulai bisnis, menegakkan kontrak, dan menangani izin konstruksi. Sementara Bappenas (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia) menunjukkan prioritas investasi hijau, strategi pengembangan layanan kesehatan, dan peta jalan ekonomi digital. Selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempublikasikan pandangan tingkat sektor untuk keuangan, asuransi, fintech, dan inisiatif ESG dan Pusat Promosi Investasi Indonesia (IIPC) Tokyo, Singapura, Dubai dalam laporan tahun 2023 mendaftarkan umpan balik investor global tentang daya tarik dan risiko spesifik sektor dalam bentuk buku presentasi investasi regional dan dasbor risiko.

Secara umum risiko dan daya tarik masing-masing sektor dinilai berdasarkan: (1) Kompleksitas regulasi; (2) Prospek pertumbuhan pasar; (3) Ketersediaan insentif; (4) Stabilitas makroekonomi dan politik; dan (5) Aliran FDI secara historis.

### 3.3.2 Tata Kelola dan Kerangka Kerja Regulasi di Aceh

Aceh memiliki posisi yang khas di Indonesia karena status otonomi khususnya, yang memberikan wewenang regulasi unik, termasuk dalam tata kelola investasi. Meskipun kerangka kebijakan investasi nasional sebagian besar berlaku di Aceh, wilayah otonomi khusus ini juga menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam (Syariah) dan memiliki tujuan investasi sendiri melalui peraturan daerah (Qanun) dan lembaga-lembaga keistimewaannya.

Aceh menyediakan lanskap investasi unik yang dicirikan oleh otonomi dan prinsip-prinsip hukum Islam. Bersamaan dengan sistem lisensi dan insentif berbasis OSS nasional, Aceh juga menyertakan pedoman untuk kepatuhan pada prinsip-prinsip agama dan budaya Islam. Hal ini membuatnya sangat menarik bagi kerangka investasi yang bersertifikat halal, berorientasi lingkungan, dan berorientasi masyarakat. Berikut kerangka hukum dan kerangka kerja investasi di Aceh

#### 1. Kerangka Hukum untuk Investasi di Aceh

a. Undang-Undang Otonomi Khusus - Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA): Memberikan kewenangan kepada Aceh untuk menyusun dan memberlakukan peraturan daerah (*Qanun*), yang mencakup peraturan yang berkaitan dengan investasi. UUPA juga memberikan kewenangan kepada provinsi ini untuk mengawasi sumber daya alam dan mengenakan pajak dan retribusi tertentu yang tidak diizinkan di provinsi lain. Undang-undang ini juga memberikan kewenangan kepada Aceh untuk mendirikan lembaga Wali Nanggroe sebagai lembaga budaya-politik, meskipun tanpa keterlibatan langsung dalam kegiatan investasi.

#### b. Undang-Undang tentang Investasi:

Kerangka hukum daerah yang utama adalah Qanun Aceh No. 5/2018 tentang Investasi. Qanun ini menganjurkan investasi yang mematuhi hukum Syariah dengan penekanan pada sektor-sektor seperti pariwisata halal, agribisnis, perkebunan, dan keuangan Islam. Investor diharapkan untuk mematuhi adat istiadat setempat dan prinsip-prinsip yang sesuai dengan Syariah Islam.

#### 2. Lembaga yang Mengatur Penanaman Modal di Aceh

a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh (DPMPTSP Aceh): Ini adalah badan sejenis BKPM tingkat provinsi. Dinas ini berkoordinasi dengan Jakarta untuk mengelola perizinan investasi, yang mencakup platform OSS-RBA, dan menawarkan layanan satu pintu dan fasilitasi bagi investor domestik dan luar negeri.

b. Badan Penanaman Modal dan Promosi Aceh adalah badan yang dikenal sebelum adanya DPMPTSP. Badan ini menekankan pemasaran internasional. Bekerja sama dengan jaringan ASEAN dan kedutaan nasional di sejumlah negara, badan ini memfasilitasi penjangkauan kepada investor asing. Namun badan ini sekarang dilebur menjadi salah satu tugas pada DPMPTSP Aceh.

### 3. Prosedur Penanaman Modal di Aceh

Sebagian besar izin usaha diperoleh melalui Sistem OSS-RBA, yang sesuai dengan norma nasional. Investor harus menyatakan kesesuaian dengan peraturan daerah, terutama ketika beroperasi di industri yang sensitif (seperti perhotelan dan hiburan). Pengawasan syariah dapat berlaku untuk industri keuangan, ritel, dan perhotelan yang diawasi oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).

### 4. Sektor Prioritas dan Insentif untuk Investasi di Aceh meliputi:

- a. Makanan dan minuman halal: Memaksimalkan branding dan kemungkinan ekspor yang sesuai dengan Syariah.
- b. Produk agribisnis dan perkebunan meliputi minyak atsiri, coklat, karet, serai, kopi (seperti kopi Gayo), dan produk hutan nonkayu lainnya.
- c. Pariwisata halal dan warisan budaya: Hotel Syariah, wisata Islam, wisata bencana (terutama tsunami), dan wisata sejarah terkait konflik.
- d. Kelautan dan perikanan: Akuakultur dan pengolahan makanan laut yang berkelanjutan.
- e. Energi baru dan terbarukan: panas bumi, biomassa, dan mikrohidro, sejalan dengan aspirasi energi hijau Aceh.

Insentif yang diberikan termasuk potongan pajak daerah berdasarkan Qanun dan UUPA. Aceh juga menawarkan Kawasan Industri Aceh dengan opsi penggunaan lahan yang dapat disesuaikan. Selain itu, secara nasional BKPM juga memberikan insentif pajak nasional untuk investasi strategis di Aceh

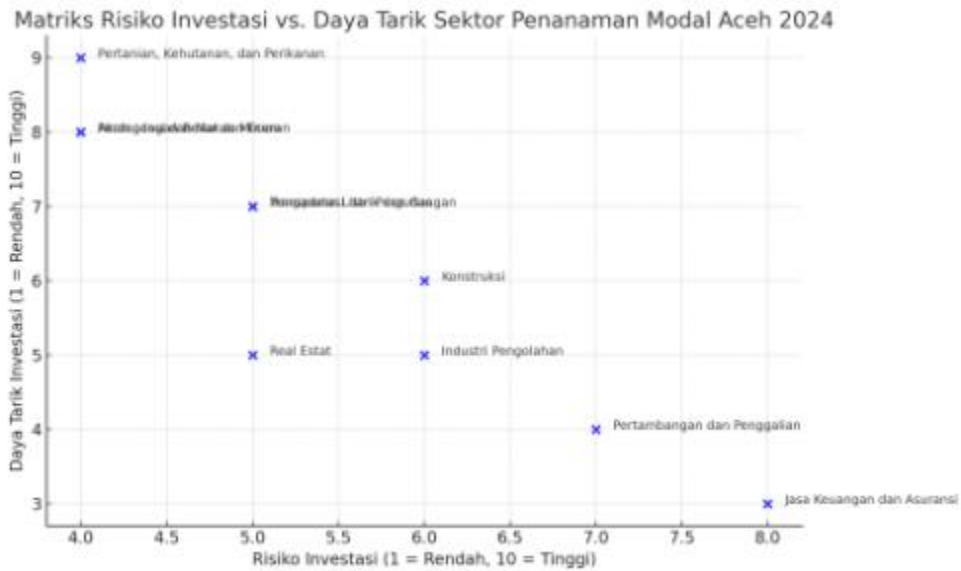
### 5. Tata Kelola dan Pembatasan Investasi Asing.

Investor asing dipersilakan, dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Mematuhi peraturan nasional dan regional (Aceh); (2) Pelibatan dan konsultasi dengan masyarakat dan standar agama; (3) Kepatuhan terhadap hukum syariah sangat dianjurkan, tetapi biasanya tidak diwajibkan secara hukum, tergantung pada industrinya.

Berdasarkan kajian tata kelola dan kerangka regulasi di atas dan informasi lainnya, secara generik dapat dikembangkan Matriks Risiko Investasi vs Daya Tarik Sektor Penanaman Modal di Aceh seperti ditunjukkan Tabel 3.5 dan Gambar 3.7.

**Tabel 3.5** Matriks Daya Tarik vs Risiko Investasi per sektor di Aceh, 2024

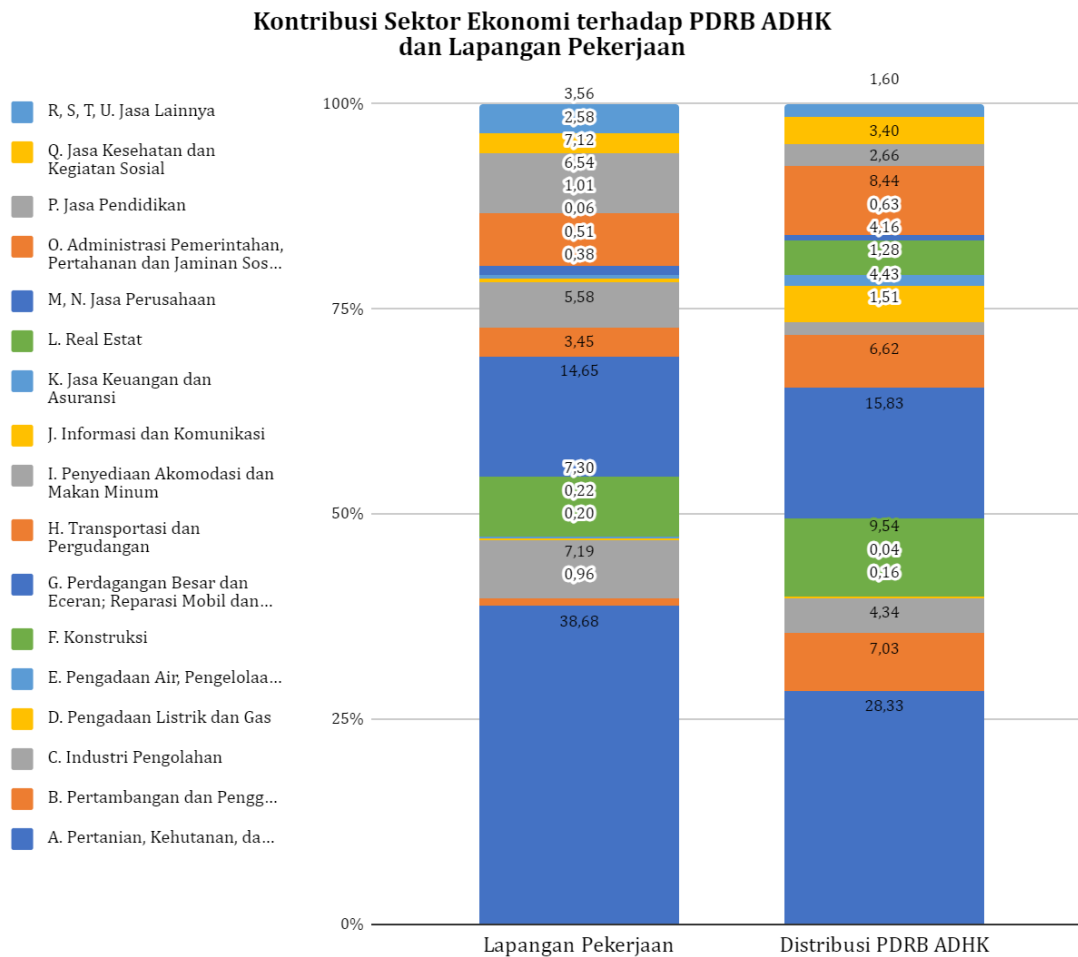
Sektor	Daya Tarik (1-10)	Risiko Investasi (1-10)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9	4
Pertambangan dan Penggalian	4	7
Industri Pengolahan	5	6
Pengadaan Listrik dan Gas	7	5
Konstruksi	6	6
Perdagangan Besar dan Eceran	8	4
Transportasi dan Pergudangan	7	5
Akomodasi dan Makan Minum	8	4
Jasa Keuangan dan Asuransi	3	8
Real Estat	5	5



**Gambar 3.7** Matriks Daya Tarik vs Risiko Investasi per sektor di Aceh, 2024

### 3.4 SDM dan Tenaga Kerja

Sumber Daya Manusia (SDM) dan tenaga kerja di Aceh masih menghadapi tantangan signifikan dalam hal kualitas dan kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja. Meskipun Aceh memiliki populasi penduduk yang cukup besar (5,55 juta jiwa per 2024), namun terdapat kesenjangan antara keterampilan tenaga kerja yang tersedia dan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri di wilayah ini.



Sumber: BPS; Keadaan angkatan kerja di Indonesia Agustus 2023, diolah

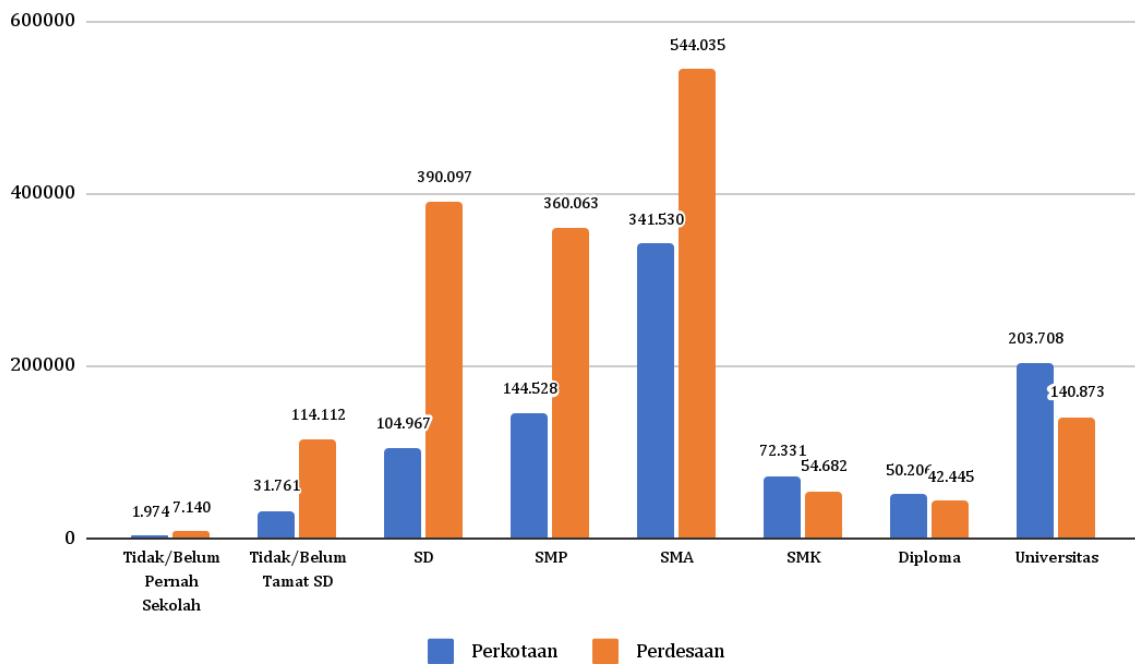
**Gambar 3.8.** Kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB dan lapangan pekerjaan di Aceh, 2023.

---

Berdasarkan **Gambar 3.8**, sebagian besar tenaga kerja di Aceh bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (38,68%), disusul sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor (14,65%), dan sektor konstruksi (7,3%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas tenaga kerja masih terserap di sektor-sektor tradisional yang umumnya memerlukan keterampilan dasar. Akibatnya, kebutuhan akan tenaga kerja terampil di sektor-sektor yang lebih modern dan teknis sering kali tidak terpenuhi, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan industri dan bisnis yang ingin berkembang di Aceh.

Kesenjangan akses pendidikan penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun dan termasuk angkatan kerja antara wilayah perkotaan dan pedesaan cukup signifikan di beberapa jenjang pendidikan. Pada kelompok penduduk yang tidak/belum pernah sekolah, jumlah penduduk di wilayah pedesaan jauh lebih tinggi (7.140 orang) dibandingkan dengan perkotaan (1.974 orang). Hal serupa terlihat pada penduduk yang tidak/belum tamat SD, di mana pedesaan memiliki 114.112 orang, lebih banyak daripada perkotaan (31.761 orang). Perbedaan yang sangat mencolok terlihat pada jenjang SD dan SMA. Di tingkat SD, jumlah penduduk pedesaan yang memiliki akses ke pendidikan dasar sangat besar (390.097 orang) dibandingkan dengan perkotaan (104.967 orang). Di tingkat SMA, jumlah penduduk di pedesaan yang menyelesaikan pendidikan SMA mencapai 544.035 orang, sementara di perkotaan hanya 341.530 orang (**Gambar 3.9**).

Namun, di jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti diploma dan universitas, penduduk perkotaan yang termasuk angkatan kerja memiliki akses yang lebih besar. Jumlah penduduk perkotaan yang mencapai jenjang diploma dan universitas masing-masing adalah 50.207 dan 203.708 orang, lebih tinggi daripada penduduk pedesaan yang masing-masing hanya 42.445 dan 140.873 orang. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa meskipun akses pendidikan di Aceh cukup baik, terdapat kesenjangan yang signifikan antara penduduk di perkotaan dan pedesaan, terutama di tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Penduduk di wilayah pedesaan cenderung mendominasi pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah, tetapi akses ke pendidikan tinggi lebih baik di perkotaan.



Sumber: BPS; Keadaan angkatan kerja di Indonesia Agustus 2023, diolah

**Gambar 3.9** Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan Provinsi Aceh, 2023

### 3.5 SDA dan Ketersediaan Bahan Baku

Aceh memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang besar dan beragam, termasuk hasil perkebunan, terutama kelapa sawit, kopi dan karet.

Berdasarkan luas areal tanaman perkebunan rakyat tahun 2023, areal terluas yaitu pada perkebunan kelapa sawit dengan luas 263,1 ribu Ha (36,72 persen), perkebunan kopi 114 ribu Ha (15,91 persen), dan perkebunan karet dengan luas 112,8 ribu Ha (15,74 persen). Perkebunan kelapa sawit memproduksi 459.727 ton sawit pada 2022. Selain itu, perkebunan kopi mampu memproduksi kopi sebanyak 71,1 ribu ton dan perkebunan karet mampu memproduksi 61,84 ribu ton selama tahun 2023.

**Tabel 3.6** Hutan dan perairan konservasi dan produksi di Aceh tahun 2022

<b>Kawasan Konservasi Hutan dan Perairan</b>	<b>Luas (Ha)</b>	<b>Persentase</b>
Konservasi Perairan	0	0,0%
Konservasi Daratan	1.058.364	29,8%
Hutan Lindung	1.781.678	50,2%
Hutan Produksi Terbatas	145.178	4,1%
Hutan Produksi Tetap	549.795	15,5%
Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	15.375	0,4%
<b>Jumlah Luas Daratan Kawasan Hutan (Ha)</b>	<b>2.492.026</b>	
<b>Jumlah Luas Daratan dan Perairan Kawasan Hutan (Ha)</b>	<b>3.550.390</b>	

Sumber: SK 580/MENLHK/SETJEN/SET.1/12/2018 dan BPS, 2023

Perkebunan kelapa sawit yang paling luas terdapat di Kabupaten Nagan Raya, yaitu dengan luas 53.151 Ha dan mampu memproduksi 100.218 ton kelapa sawit selama tahun 2022. Selanjutnya Kabupaten Aceh Singkil dengan perkebunan kelapa sawit seluas 33.050 Ha dan memproduksi 80.153 ton kelapa sawit, serta Kabupaten Aceh Timur dengan luas 28.510 Ha memproduksi 32.468 ton kelapa sawit. Dari segi produktivitas, kabupaten dengan produktivitas kelapa sawit tertinggi adalah Aceh Utara (3.917 Kg/Ha), Aceh Barat (3.516 Kg/Ha), dan Aceh Singkil (3.456 Kg/Ha).

Perkebunan kopi yang paling luas terdapat di Kabupaten Aceh Tengah, yaitu dengan luas 50.613 Ha dan mampu memproduksi 37.490 ton kopi selama tahun 2022. Selanjutnya Kabupaten Bener Meriah dengan perkebunan kopi seluas 34.693 Ha dan memproduksi 25.828 ton kopi, serta Kabupaten Aceh Besar dengan luas 10.542 Ha hanya mampu memproduksi 200 ton kopi pada 2022.

Perkebunan karet yang paling luas terdapat di Kabupaten Aceh Barat, yaitu dengan luas 24.671 Ha dan mampu memproduksi 14.741 ton karet selama tahun 2022. Selanjutnya Kabupaten Aceh Timur dengan perkebunan karet seluas 23.536 Ha dan memproduksi 15.165 ton karet, serta Kabupaten Aceh Tamiang dengan luas 15.834 Ha mampu memproduksi 8.779 ton karet pada 2022.

**Tabel 3.7** Luas areal tanaman perkebunan, 2023

<b>Jenis</b>	<b>Luas (Ribu Ha)</b>	<b>Persentase</b>	<b>Produksi (Ribu Ton)</b>
Karet	112,8	15,74%	61,8
Kelapa	102,6	14,32%	63,1
Kelapa Sawit	263,1	36,72%	...
Kopi	114,0	15,91%	71,1
Kakao	93,4	13,04%	36,6
Teh	-	0,00%	-
Jambu mete	-	0,00%	-
Pala	23,4	3,27%	6,7
Lada	0,9	0,13%	0,3
Tebu	2,8	0,39%	5,9
Tembakau	2,5	0,35%	2,2
Nilam	1,0	0,14%	0,1

Sumber: BPS: Aceh dalam angka 2024 (Angka Sementara)

---

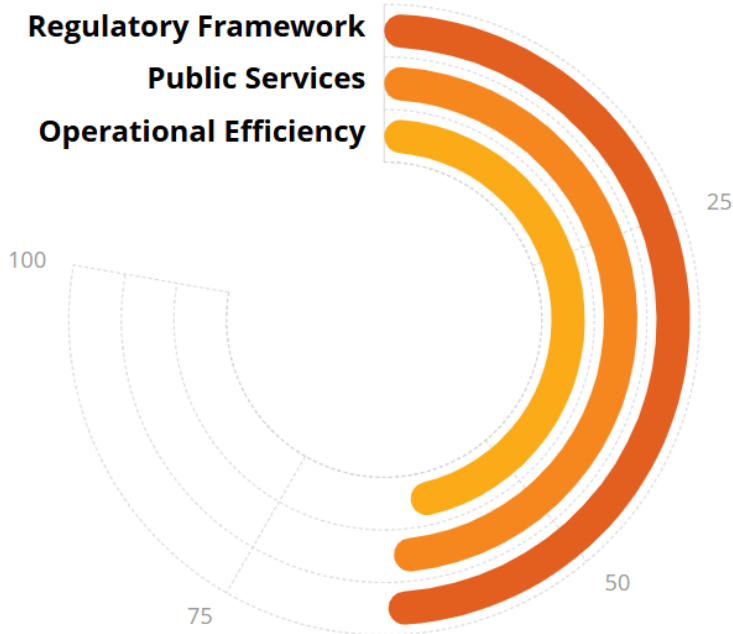
# BAB IV - ANALISIS PERSEPSI INVESTOR

## 4.1 Laporan *Business Ready*

*Business Ready (B-Ready)* merupakan laporan untuk mengukur kemudahan berbisnis di berbagai negara. Laporan ini bertujuan untuk mengadvokasi reformasi kebijakan, menginformasikan saran kebijakan tertentu, dan menyediakan data untuk kebijakan dalam pembangunan di setiap negara di dunia (Auriga, et.al, 2024). Laporan B-Ready menggunakan tiga pilar seperti ditunjukkan **Gambar 4.1**, yaitu:

1. **Kerangka Regulasi** mencakup aturan dan regulasi yang harus diikuti oleh perusahaan saat membuka, menjalankan (atau memperluas), serta menutup (atau restrukturisasi) bisnis. Indikator di bawah pilar ini membedakan antara aturan dan regulasi yang mendorong kejelasan, keadilan, serta keberlanjutan lingkungan bisnis, dengan yang justru menghambat aktivitas kewirausahaan secara tidak perlu.
2. **Layanan Publik** mencakup fasilitas yang disediakan pemerintah untuk mendukung kepatuhan terhadap regulasi, serta institusi dan infrastruktur yang memungkinkan kegiatan bisnis. Indikator dalam pilar ini terbatas pada ruang lingkup lingkungan bisnis di area yang berkaitan dengan siklus hidup perusahaan. Pilar ini menekankan aspek seperti digitalisasi, interoperabilitas layanan pemerintah, dan transparansi.
3. **Efisiensi Operasional** mencakup kemudahan kepatuhan terhadap kerangka regulasi serta pemanfaatan layanan publik secara efektif yang secara langsung relevan dengan perusahaan.

Selanjutnya pilar-pilar (dimensi-dimensi) ini dinilai berdasarkan sejumlah indikator seperti tenaga kerja, layanan utilitas, lokasi bisnis, tingkat persaingan pasar, layanan keuangan, dan indikator aspek lainnya.



Sumber: World bank, 2024

**Gambar 4.1** Pilar penilaian *Business Ready (B-READY)* dari World Bank, 2024

Laporan *Business Ready (B-READY)* terbaru yang mencakup Indonesia diterbitkan oleh World Bank pada tahun 2024. Ini adalah laporan pengganti dari seri *Ease of Doing Business* yang dihentikan, dan edisi perdananya mencakup evaluasi menyeluruh atas kesiapan ekosistem bisnis di berbagai negara, termasuk Indonesia. Laporan ini menyajikan penilaian terhadap: (1) Tenaga kerja, (2) Layanan utilitas, (3) Lokasi bisnis, (4) Persaingan pasar, (5) Layanan keuangan, (6) Kepailitan bisnis, dan aspek lainnya.

Indonesia meraih nilai tertinggi dalam bidang tenaga kerja, layanan utilitas, dan lokasi bisnis (**Gambar 4.2**). Menurut laporan ini, wilayah-wilayah ini yang tinggi peringkatnya dalam kategori ini menunjukkan perekonomian yang menawarkan pusat-pusat ketenagakerjaan dan pelatihan bagi para pencari kerja, menegakkan peraturan mengenai internet, listrik, dan air, serta menyediakan informasi yang transparan mengenai izin bangunan, zonasi, dan penggunaan lahan.

Namun peringkat Indonesia masih rendah dalam Persaingan Pasar, Layanan Keuangan, dan Kepailitan Bisnis. Artinya, Indonesia termasuk di antara wilayah-wilayah perekonomian yang tidak memiliki kantor transfer teknologi dan taman sains dan teknologi; pendaftaran agunan tidak

berdasarkan pemberitahuan, dan kerangka legislatif tidak mengakomodasi proses kepailitan khusus untuk perusahaan mikro dan kecil.



Sumber: World Bank 2024

**Gambar 4.2** Posisi Indonesia per aspek dalam B-Ready 2024 World Bank

Seperti ditunjukkan pada **Gambar 4.1**, Indonesia menunjukkan kekuatan dalam aspek:

1. Tenaga Kerja: Ini artinya Indonesia memiliki sejumlah wilayah perekonomian dimana tersedianya pusat-pusat pelatihan tenaga kerja dengan kebijakan ketenagakerjaan yang relatif mendukung pencari kerja.
2. Layanan Utilitas: Indonesia dianggap mempunyai regulasi yang jelas dan diterapkan secara konsisten terhadap akses internet, air bersih, dan listrik. Indonesia juga dianggap mempunyai infrastruktur layanan dasar cukup merata.
3. Lokasi Bisnis: Dalam aspek ini, informasi publik terkait zonasi, izin pembangunan, dan penggunaan lahan dianggap tersedia secara transparan. Indonesia juga dianggap telah membangun prosedur perizinan lebih efisien di beberapa wilayah.

Implikasi positif dari kekuatan tiga aspek di atas adalah menjadikan beberapa kota di Indonesia menarik sebagai tujuan investasi sektor riil, khususnya sektor padat karya seperti manufaktur ringan dan pengolahan.

---

Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam:

1. Persaingan Pasar: Ini menunjukkan sejumlah wilayah di Indonesia masih menunjukkan minimnya infrastruktur inovasi seperti *technology transfer offices* atau *science* dan *tech parks* sehingga dapat menghambat dinamika pasar. Indikator ini juga menunjukkan kurangnya kebijakan untuk mendorong inovasi dan diversifikasi bisnis.
2. Layanan Keuangan: Sistem pendaftaran jaminan (agunan) tidak berbasis *notice filing*, sehingga memperlambat akses kredit, khususnya bagi UMKM. Aspek ini juga menunjukkan rendahnya inklusi keuangan di beberapa daerah.
3. Kepailitan Bisnis: Sejumlah wilayah di Indonesia tidak memiliki kerangka hukum yang mendukung restrukturisasi khusus untuk UMKM. Proses kebangkrutan masih terlalu formal, mahal, dan lama, sehingga banyak bisnis kecil memilih tutup tanpa mekanisme pemulihan.

Implikasi negatif dari kelemahan-kelemahan ini di antaranya dapat menghambat penciptaan ekosistem bisnis yang sehat dan memperlambat pertumbuhan sektor inovatif serta pembiayaan usaha kecil.

Karena itu, Bank Dunia dalam laporan tersebut menganjurkan beberapa rekomendasi strategis, yaitu: (1) Inovasi dan Teknologi: Mendirikan lebih banyak *tech incubators* dan *science parks* untuk memperkuat ekosistem inovasi; (2) Reformasi Layanan Keuangan: Mengadopsi sistem *notice-based collateral registry* seperti di negara-negara ASEAN lainnya; (3) Kepailitan Mikro: Mendesain ulang kerangka hukum untuk restrukturisasi utang khusus UMKM agar lebih ringkas dan terjangkau.

Laporan *Subnational Doing Business Indonesia 2012* dari Bank Dunia mencakup wilayah Aceh. Laporan tersebut mencakup 14 kota di Indonesia, termasuk Banda Aceh. Laporan ini mengevaluasi kemudahan berusaha dalam empat area utama: (1) Memulai usaha, (2) Mendapatkan izin bangunan, (3) Pendaftaran properti, (4) Penegakan kontrak.

Laporan ini menunjukkan Banda Aceh cenderung memiliki performa yang lebih baik dari rata-rata nasional dalam hal pendaftaran properti. Namun, aspek memulai usaha dan penegakan kontrak masih menunjukkan prosedur yang lebih panjang dan birokratis dibanding kota seperti Yogyakarta atau Balikpapan.

Berikut adalah ringkasan temuan untuk Banda Aceh berdasarkan indikator yang digunakan oleh Bank Dunia dalam laporan tersebut.

1. Memulai Usaha: Waktu rata-rata mendirikan usaha: 38 hari; Jumlah prosedur: 10 tahapan. Tantangan utama: koordinasi antarlembaga dan waktu tunggu legalisasi akta perusahaan.

2. Mengurus Izin Mendirikan Bangunan: Jumlah prosedur: 17; Waktu pemrosesan:  $\pm$  175 hari. Biaya cukup tinggi dibanding kota lain, karena adanya beberapa retribusi tambahan. Hambatan besar: kurangnya transparansi dan koordinasi antarinstansi teknis.

3. Pendaftaran Properti: Banda Aceh mencatat kinerja yang lebih baik dari rata-rata nasional. Prosedur lebih sedikit ( $\pm$ 5) dan waktu lebih cepat ( $\pm$ 22 hari). Dukungan dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) daerah cukup efisien

4. Penegakan Kontrak: Waktu penyelesaian sengketa perdata:  $\pm$  600 hari; Prosedur hukum:  $\pm$  40 tahapan. Masih ada tantangan di efisiensi pengadilan dan keterlambatan proses notifikasi.

Secara umum, Banda Aceh menunjukkan kinerja menengah di antara kota-kota lain di Indonesia dalam laporan *Doing Business 2012* tersebut. Meskipun cukup baik dalam aspek pendaftaran properti, perlu perbaikan dalam hal efisiensi birokrasi perizinan usaha dan kecepatan penegakan hukum.

**Tabel 4.1** menunjukkan perbandingan kinerja kota-kota Indonesia termasuk Banda Aceh dalam empat indikator utama *Subnational Doing Business 2012* Bank Dunia. Skor dalam skala 1–10 (semakin tinggi = semakin baik).

**Tabel 4.1** Perbandingan kinerja kemudahan berusaha di Kota Banda Aceh dan beberapa kota lain.

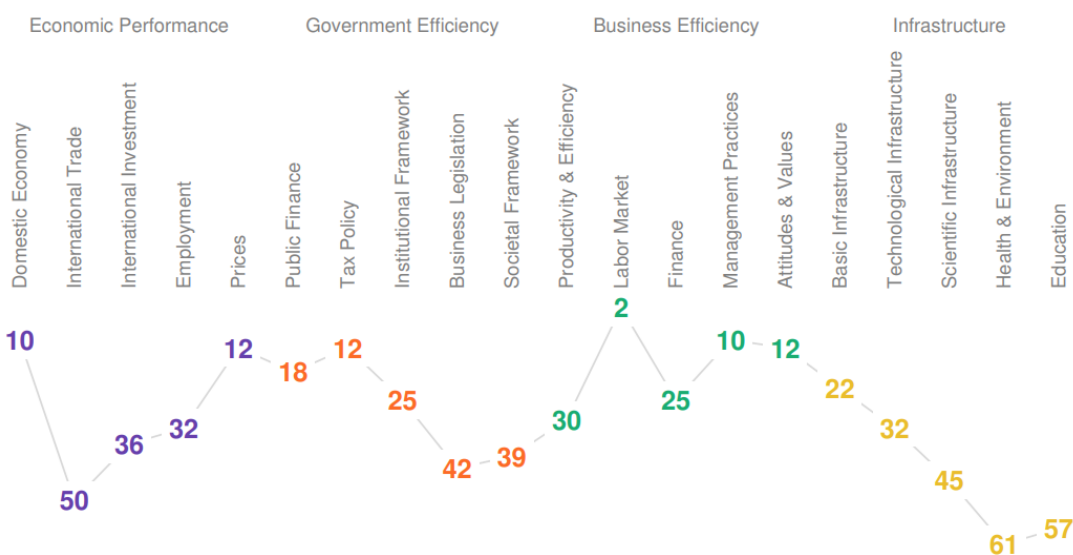
<b>Kota</b>	<b>Memulai Usaha</b>	<b>Izin Bangunan</b>	<b>Pendaftaran Properti</b>	<b>Penegakan Kontrak</b>
<b>Banda Aceh</b>	5.0	4.2	7.5	4.5
<b>Yogyakarta</b>	7.8	6.2	7.0	6.5
<b>Balikpapan</b>	7.2	5.8	6.8	6.2
<b>Surabaya</b>	6.0	5.5	6.5	5.8
<b>Makassar</b>	6.8	5.0	6.2	5.5

Sumber: *Subnational Doing Business 2012*, Bank Dunia

## 4.2 Indeks Daya Saing Investasi Indonesia

Menurut laporan dari *International Institute for Management Development (IMD)* melalui *World Competitiveness Ranking (WCR) 2024*, Indonesia menempati peringkat ke-27 dari 67 negara, mengalami peningkatan tujuh peringkat dari posisi sebelumnya di peringkat 34, dengan skor 71,52. Ini merupakan capaian terbaik Indonesia sejak tahun 1997. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di posisi tiga besar, hanya di bawah Singapura (peringkat 1) dan Thailand (peringkat 25).

### COMPETITIVENESS LANDSCAPE



Sumber : <https://www.imd.org/entity-profile/indonesia-wcr/>

**Gambar 4.3** Indeks Daya Saing Indonesia

Dalam profil *World Competitiveness Ranking 2024*, Indonesia menonjol dalam efisiensi bisnis, menduduki peringkat ke-14 dengan skor rata-rata 71,4. Keunggulan ini terutama didukung oleh subsektor pasar tenaga kerja, di mana Indonesia berada di peringkat kedua setelah Singapura, menandakan efisiensi tenaga kerja yang kompetitif untuk pertumbuhan ekonomi.

Pada sektor performa ekonomi, Indonesia berada di peringkat 24 dengan skor 54,3, dan di sektor efisiensi pemerintahan, peringkat 23 dengan skor 57,5, mencerminkan peningkatan kapasitas regulasi dan pengelolaan pemerintah (**Gambar 4.3**).

Namun, tantangan besar masih terlihat di sektor infrastruktur, di mana Indonesia menempati peringkat 52 dengan skor 34,6. Dalam sektor ini, subsektor kesehatan dan lingkungan berada di peringkat terendah, yaitu 61, dengan skor 28,1, diikuti oleh pendidikan di peringkat 57 dengan skor 26,6. Meskipun ada tantangan infrastruktur, pencapaian Indonesia di bidang efisiensi bisnis dan pemerintahan memperlihatkan potensi untuk terus memperkuat daya saing di tingkat global.

### 4.3 Indeks Daya Saing Investasi Aceh

Di Indonesia sendiri terdapat terdapat penelitian yang sempat dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mengukur Indeks Daya Saing Daerah. Pengukuran ini mengadopsi kerangka Pengukuran pada IDSD 2023 ini mengadopsi kerangka konseptual yang sama dengan Global Competitiveness Index (GCI) dari World Economic Forum atau WEF (Schwab, 2019). Penyesuaian dilakukan pada level indikator dan metode pengukuran yang disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia dan ketersediaan data.

Pada tahun 2023, Penyusunan IDSD melalui tujuh tahap: pemantapan kerangka konseptual, evaluasi indikator, pengumpulan, pengolahan, standardisasi data, penghitungan skor akhir, dan kontrol kualitas (uji statistik). Pengukuran dilakukan pada 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota, dengan 398 kabupaten/kota yang berhasil dihitung dan 116 lainnya tidak dihitung karena data kurang lengkap. Sebanyak 63 indikator digunakan untuk provinsi dan 48 indikator untuk kabupaten/kota (**Gambar 4.4**).

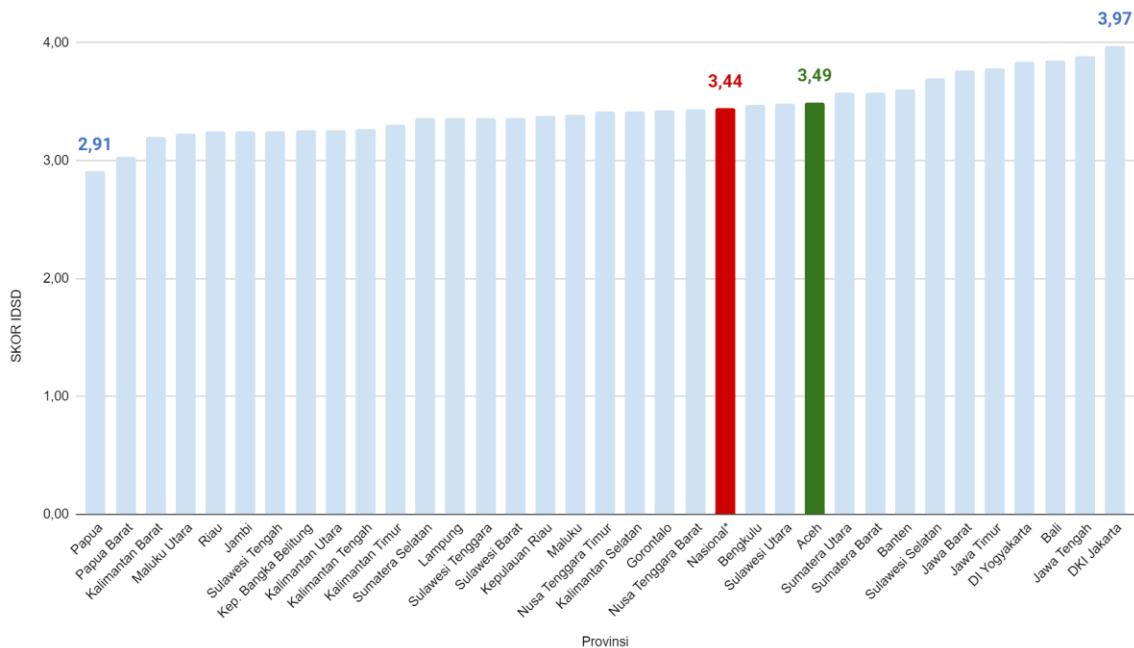
**PETA SEBARAN SKOR IDSD PROVINSI 2023**



Sumber : Indeks Daya Saing Daerah 2023, BRIN, 2024

**Gambar 4.4** Peta Indeks Daya Saing Daerah 2024

Secara nasional, pada tahun 2023, Provinsi Aceh memiliki nilai IDSD yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Nilai IDSD Aceh mencapai 3,49, sedangkan nilai rata-rata nasional berada pada angka 3,44. Dengan perolehan ini, Provinsi Aceh menduduki peringkat ke-11, sementara peringkat pertama ditempati oleh DKI Jakarta dengan nilai 3,97. Grafik perbandingan nilai ini dapat dilihat pada **Gambar 4.5**.

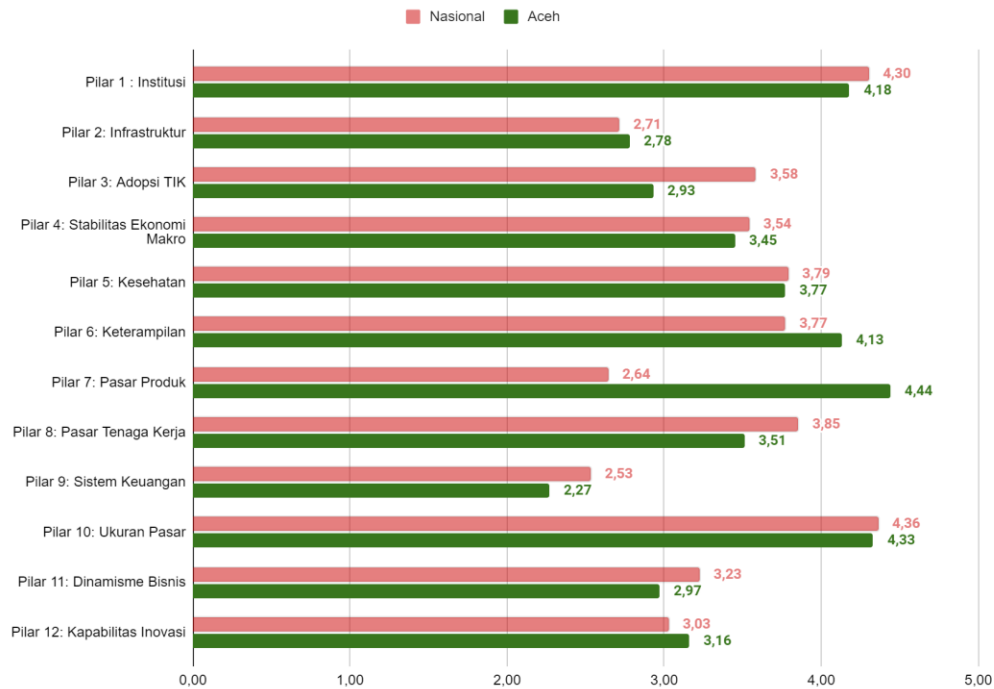


Sumber : Indeks Daya Saing Daerah 2023, BRIN, 2024

**Gambar 4.5** Grafik Indeks Daya Saing Daerah 2023

Berdasarkan grafik perbandingan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2023 (**Gambar 4.6**), Provinsi Aceh memperlihatkan performa yang beragam di setiap pilar daya saing jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Beberapa pilar menunjukkan keunggulan Aceh, seperti pada adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), keterampilan tenaga kerja, pasar tenaga kerja, serta kapabilitas inovasi. Pada pilar adopsi TIK, Aceh unggul dengan skor yang lebih tinggi daripada rata-rata nasional, mencerminkan upaya daerah dalam mengadopsi teknologi digital dan memperkuat infrastruktur TIK. Demikian pula dalam hal keterampilan dan pasar tenaga kerja, Aceh menunjukkan skor yang lebih tinggi, yang menandakan bahwa tenaga kerja di Aceh memiliki

keterampilan kompetitif, serta pasar tenaga kerjanya yang aktif mendukung kebutuhan industri lokal.



Sumber : Indeks Daya Saing Daerah 2023, BRIN, 2024

**Gambar 4.6** Perbandingan Indeks Daya Saing Indonesia dan Aceh

Di sisi lain, terdapat pilar yang masih menjadi tantangan bagi Aceh, seperti pasar produk dan sistem keuangan. Pada pilar pasar produk, Aceh berada di bawah rata-rata nasional, yang mengindikasikan adanya kendala dalam pengembangan pasar produk lokal, serta keterbatasan akses atau daya tarik terhadap produk daerah. Sistem keuangan di Aceh juga tertinggal, dengan skor yang lebih rendah dibandingkan standar nasional, yang menunjukkan kebutuhan akan pengembangan layanan keuangan yang lebih mendukung, baik bagi usaha kecil maupun industri besar di wilayah ini.

Beberapa pilar lain menunjukkan bahwa nilai Aceh mendekati rata-rata nasional, seperti dalam aspek institusi, stabilitas ekonomi makro, kesehatan, dan dinamisme bisnis. Ini berarti, meskipun Aceh tidak unggul secara signifikan, tingkat daya saing di pilar-pilar ini cukup sebanding dengan standar nasional, mencerminkan keseimbangan yang baik dalam aspek kelembagaan, stabilitas

ekonomi, kualitas kesehatan, dan dinamisme bisnis. Pilar-pilar ini menjadi fondasi yang perlu dipertahankan untuk menjaga kestabilan ekonomi daerah.

Di Aceh sendiri, Dinas Penanaman Modal dan Pela Terpadu Satu Pinto (DPMPTSP) provinsi mengembangkan Indeks Daya Saing Investasi sejak lima tahun terakhir. Indeks ini sudah mulai dikenal oleh pemerintah kabupaten/kota di Aceh dengan penghargaan untuk kabupaten/kota dengan kinerja terbaik pada setiap kegiatan *Aceh Gayo Sustainable Investment Dialogue* (AGaSID)

**Tabel 4.2** Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Kota se Aceh Tahun 2022-2024

Kabupaten/Kota	Nilai Lingkup								Nilai Indeks Daya Saing		Peringkat	
	Stabilitas Ekonomi Makro		Pemerintahan dan Institusi Publik		Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja		Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur					
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Banda Aceh	1	4	13	14	1	1	1	2	1	1	1	1
Aceh Besar	3	3	1	1	3	11	3	1	2	2	2	2
Aceh Utara	5	1	8	4	2	3	6	9	3	3	3	3
Bener Meriah	17	14	11	2	13	9	4	5	10	4	10	4
Aceh Barat	9	9	2	15	5	5	10	4	5	5	5	5
Lhokseumawe	4	5	17	17	6	7	9	7	6	6	6	6
Sabang	20	19	14	3	16	15	2	3	12	7	12	7
Bireuen	6	7	5	9	4	4	7	10	4	8	4	8
Nagan Raya	2	2	18	21	7	2	15	12	8	9	8	9
Pidie	7	6	7	6	12	6	11	16	9	10	9	10
Aceh Tengah	10	12	9	7	8	13	5	8	7	11	7	11
Aceh Selatan	14	16	3	16	15	10	13	14	11	12	11	12
Aceh Tamiang	13	11	19	12	10	12	18	20	17	13	17	13
Aceh Timur	8	8	15	19	9	8	22	21	15	14	15	14
Pidie Jaya	21	21	4	8	20	18	16	11	16	15	16	15
Langsa	11	9	12	18	14	16	14	13	14	16	14	16
Aceh Barat Daya	12	13	22	13	17	21	20	15	21	17	21	17
Aceh Jaya	16	17	6	11	11	14	8	17	13	18	19	18
Singkil	18	20	10	10	22	23	17	18	18	19	18	19
Simeulue	23	23	20	5	23	20	12	6	19	20	19	20
Aceh Tenggara	22	15	23	22	19	17	19	19	22	21	22	21
Gayo Lues	19	18	16	20	18	22	21	22	20	22	20	22
Subulussalam	15	22	21	22	21	19	23	23	23	23	23	23

Sumber: Indeks Daya Saing Investasi Aceh, DPMPTSP Aceh, 2023

---

Berdasarkan Tabel 4.2, peringkat daya saing investasi di Aceh untuk tahun 2022-2023 masih didominasi oleh Banda Aceh, yang merupakan ibu kota provinsi. Peringkat selanjutnya ditempati oleh Aceh Besar dan Aceh Utara, Namun terjadi perubahan signifikan pada peringkat keempat, di mana Kabupaten Bireuen yang menduduki posisi tersebut pada tahun 2022, kini digantikan oleh Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2023. Selain itu, Kota Sabang juga mengalami lonjakan yang signifikan, dari peringkat 12 menjadi peringkat 7. Di sisi lain, Kota Subulussalam mencatatkan peringkat daya saing investasi terendah.

Berdasarkan nilai lingkup, Banda Aceh menunjukkan keunggulan dibandingkan kabupaten dan kota lain, terutama dalam aspek Keuangan, Bisnis, dan Tenaga Kerja. Namun, dalam lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik, Banda Aceh memperoleh peringkat yang tergolong menengah. Di sisi lain, Aceh Besar menonjol dengan nilai tertinggi pada lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, serta meraih skor tertinggi dalam Pemerintahan dan Institusi Publik. Sementara itu, Aceh Utara berhasil menduduki peringkat teratas pada lingkup Stabilitas Ekonomi Makro, menunjukkan kinerja yang solid dalam aspek ekonomi.

### 4.3 Survei Persepsi Investor Aceh 2024

Survei Persepsi Investor Aceh 2024 merupakan tindak lanjut dari survei hambatan investasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 oleh Pemerintah Aceh melalui DPMPTSP Aceh. Menggunakan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebagai dasar pemilihan sampel (*sampling frame*), survei ini bertujuan untuk menggali lebih dalam pandangan dan pengalaman para investor/pelaku usaha di Aceh. Berdasarkan data tersebut, dipilih secara acak sejumlah perusahaan yang tersebar di 23 kabupaten/kota dan mencakup 23 sektor usaha. Sampel dipilih melalui metode *stratified random sampling*, di mana perusahaan dari setiap sektor dipilih secara acak, dengan jumlah sampel yang berbeda-beda sesuai dengan proporsi sektor tersebut dalam populasi. Pendekatan ini memastikan representasi yang akurat dan memberikan gambaran menyeluruh tentang persepsi investor/pelaku usaha di berbagai sektor usaha dan berbagai wilayah di Aceh.

Untuk mencapai tingkat kepercayaan 95% dengan *margin of error* 5%, diperlukan 312 sampel dalam Survei Persepsi Investor Aceh 2024. Namun, DPMPTSP Aceh memutuskan untuk memperluas jangkauan dengan mengirimkan kuesioner kepada 400 perusahaan yang dipilih secara acak di seluruh Aceh. Kuesioner ini disebarluaskan secara online melalui email dan pesan aplikasi WhatsApp. Bagi perusahaan yang belum merespons, dilakukan tindak lanjut melalui telepon dan

kunjungan langsung ke lokasi usaha. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi dan memastikan data yang terkumpul lebih representatif.

Pengambilan 400 sampel perusahaan ini menggunakan metode *stratified random sampling* untuk memastikan keterwakilan dari 23 sektor usaha dan seluruh kabupaten/kota di Aceh. Dengan *stratified random sampling*, populasi perusahaan dibagi ke dalam kelompok-kelompok (strata) berdasarkan sektor usaha. Kemudian, dari setiap strata ini, sampel dipilih secara acak sesuai proporsi jumlah perusahaan di masing-masing sektor dan wilayah. Pendekatan ini menjamin bahwa hasil survei mencerminkan kondisi dan persepsi yang lebih akurat dari seluruh populasi dunia usaha/investor di Aceh.

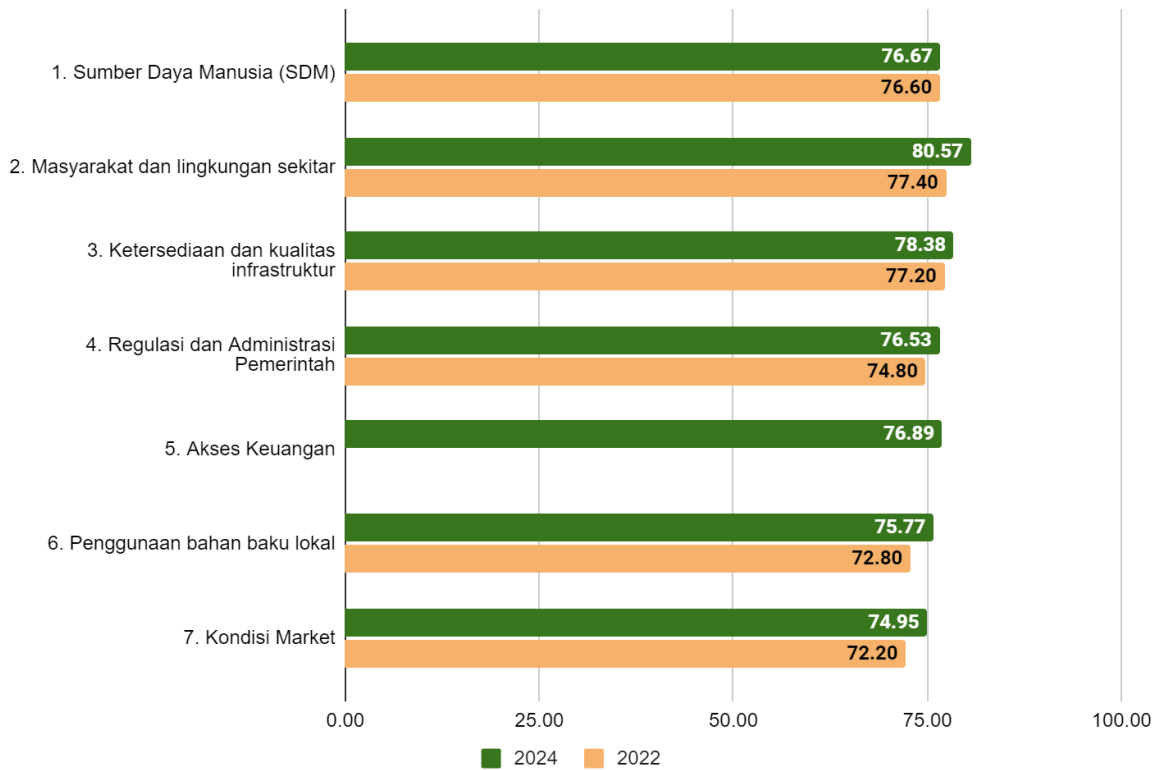
Kuesioner persepsi investor ini dirancang untuk mengukur tujuh variabel utama yang mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi iklim investasi di Aceh, yaitu:

1. Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Masyarakat dan Lingkungan sekitar (Keamanan dan Kenyamanan);
3. Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur;
4. Regulasi dan Administrasi Pemerintah;
5. Akses Keuangan
6. Penggunaan Bahan Baku; dan
7. Kondisi Pasar.

Setiap variabel ini diukur melalui sejumlah indikator spesifik menggunakan skala Likert, di mana responden diminta untuk memberikan pendapat mereka terhadap pernyataan-pernyataan yang disediakan, dengan pilihan jawaban dari “Sangat Tidak Setuju” hingga “Sangat Setuju.” Selain itu, terdapat beberapa pertanyaan terbuka untuk mendapatkan masukan lebih mendalam dari responden. Pendekatan ini memungkinkan penilaian kuantitatif dan kualitatif atas persepsi investor di Aceh terhadap kondisi investasi.

Hasil survei menunjukkan adanya peningkatan pada hampir semua variabel antara tahun 2022 dan 2024 (**Gambar 4.7**). Variabel Sumber Daya Manusia (SDM) relatif stabil dengan sedikit peningkatan dari 76,60 pada 2022 menjadi 76,67 di 2024. Sementara itu, Variabel Masyarakat dan Lingkungan Sekitar mengalami peningkatan signifikan dari 77,40 menjadi 80,57, menunjukkan perbaikan dalam hubungan dan dampak terhadap lingkungan sekitar investor/pelaku usaha. Pada Variabel Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur, terjadi kenaikan dari 77,20 menjadi 78,38, mengindikasikan adanya perbaikan fasilitas infrastruktur. Variabel Regulasi dan Administrasi Pemerintah juga mencatat peningkatan dari 74,80 menjadi 76,53, menunjukkan upaya perbaikan dalam tata kelola dan regulasi. Peningkatan skor juga terlihat pada Penggunaan Bahan Baku Lokal, dan Kondisi Market, yang masing-masing mengalami kenaikan, pemanfaatan bahan lokal, serta kondisi pasar secara keseluruhan. Peningkatan ini mencerminkan upaya yang berhasil dalam

berbagai aspek yang dinilai. Variabel Akses Keuangan merupakan tambahan baru di tahun 2024 dengan skor yang cukup tinggi, yaitu 76,89, mencerminkan akses keuangan yang cukup baik.



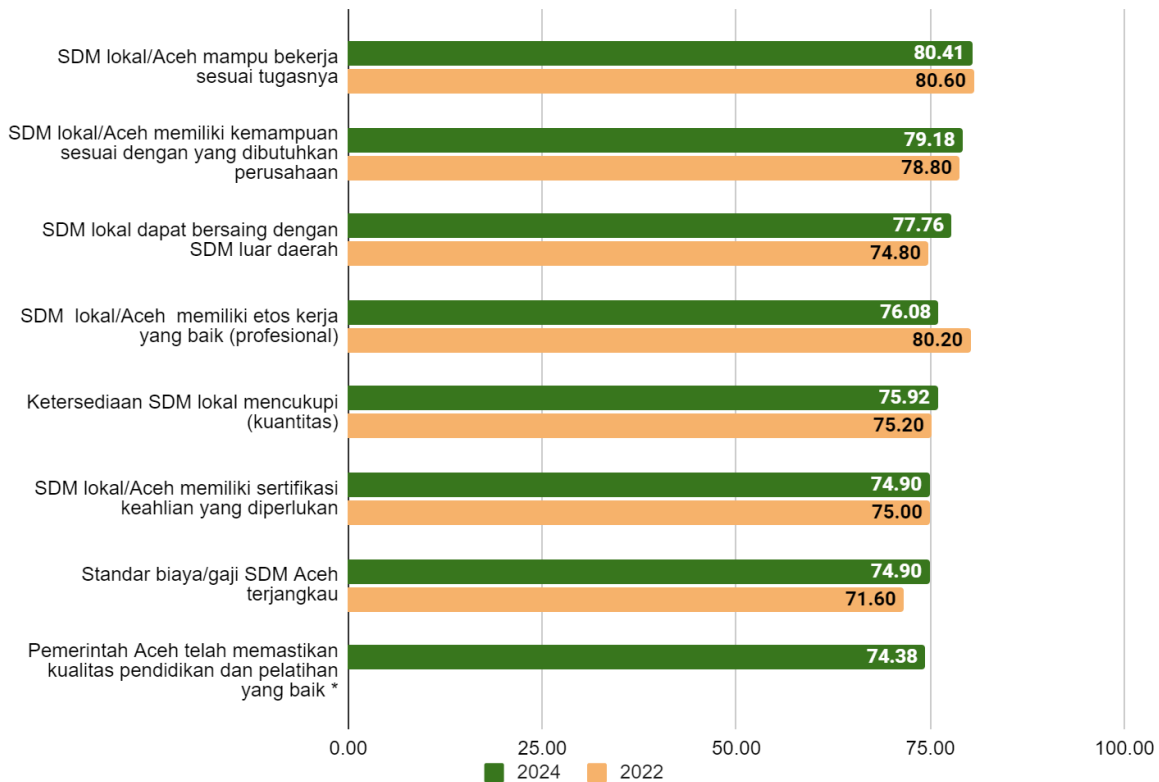
Sumber: Survei Persepsi Investor Aceh 2024, DPMPTSP Aceh, 2024 (diolah)

**Gambar 4.7.** Perbandingan Hasil Survei Persepsi Investor/Pelaku Usaha 2024 dari 2022

Selanjutnya akan dibahas perkembangan indikator-indikator untuk setiap variabel—kebutuhan sumber daya manusia (SDM), sikap masyarakat dan lingkungan sekitar (keamanan dan kenyamanan berusaha), ketersediaan dan kualitas infrastruktur, keramahan/kemudahan regulasi dan administrasi pemerintah, akses keuangan, ketersediaan dan penggunaan bahan baku lokal, dan kondisi pasar—untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman lebih lengkap dan utuh tentang persepsi investor/pelaku usaha di Aceh.

## Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan **Gambar 4.5**, kualitas SDM diukur melalui delapan indikator yang menunjukkan hasil yang bervariasi antara tahun 2022 dan 2024. Tiga indikator mengalami penurunan, yaitu kemampuan SDM lokal bekerja sesuai tugasnya (dari 80,60 menjadi 80,41), etos kerja SDM lokal (dari 80,20 menjadi 76,08), dan sertifikasi keahlian SDM lokal (dari 75,00 menjadi 74,90). Penurunan terbesar terjadi pada indikator etos kerja SDM lokal, yang mencerminkan penurunan dalam aspek profesionalitas dan sikap kerja.



Sumber: Survei Persepsi Investor Aceh 2024, DPMPSTP Aceh, 2024 (diolah)

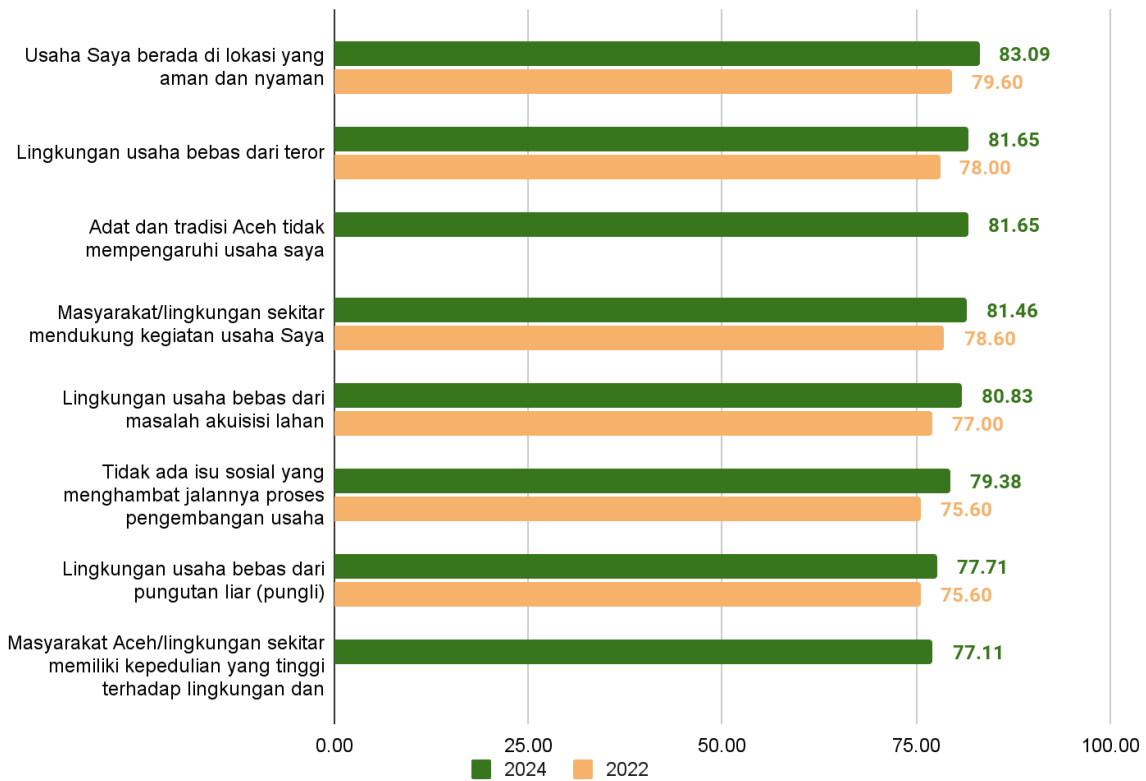
### **Gambar 4.8** Persepsi investor/pelaku usaha pada variabel sumber daya manusia (SDM)

Sebaliknya, beberapa indikator menunjukkan peningkatan, seperti kemampuan SDM lokal bersaing dengan SDM luar daerah, yang naik dari 74,80 menjadi 77,76, serta standar biaya/gaji SDM Aceh terjangkau, yang meningkat signifikan dari 71,60 menjadi 74,90. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa SDM lokal semakin kompetitif dan mendapatkan apresiasi yang lebih baik dalam hal remunerasi. Selain itu, indikator ketersediaan SDM lokal dan jaminan pemerintah terhadap kualitas pendidikan dan pelatihan juga menunjukkan hasil yang stabil atau meningkat,

menandakan adanya konsistensi dan perbaikan dalam upaya peningkatan kualitas SDM. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa meskipun ada beberapa tantangan, SDM lokal secara keseluruhan menunjukkan daya saing

### Masyarakat dan lingkungan sekitar (keamanan dan kenyamanan berusaha)

**Gambar 4.6** menunjukkan persepsi investor/pelaku usaha terhadap variabel masyarakat dan lingkungan sekitar. Hampir semua indikator mengalami peningkatan antara tahun 2022 dan 2024. Indikator lokasi usaha yang aman dan nyaman mencatat peningkatan dari 79,60 menjadi 83,09, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam keamanan dan kenyamanan tempat usaha. Selain itu, lingkungan usaha bebas dari teror juga meningkat dari 78,00 menjadi 81,65, mencerminkan rasa aman yang lebih tinggi di kalangan investor.



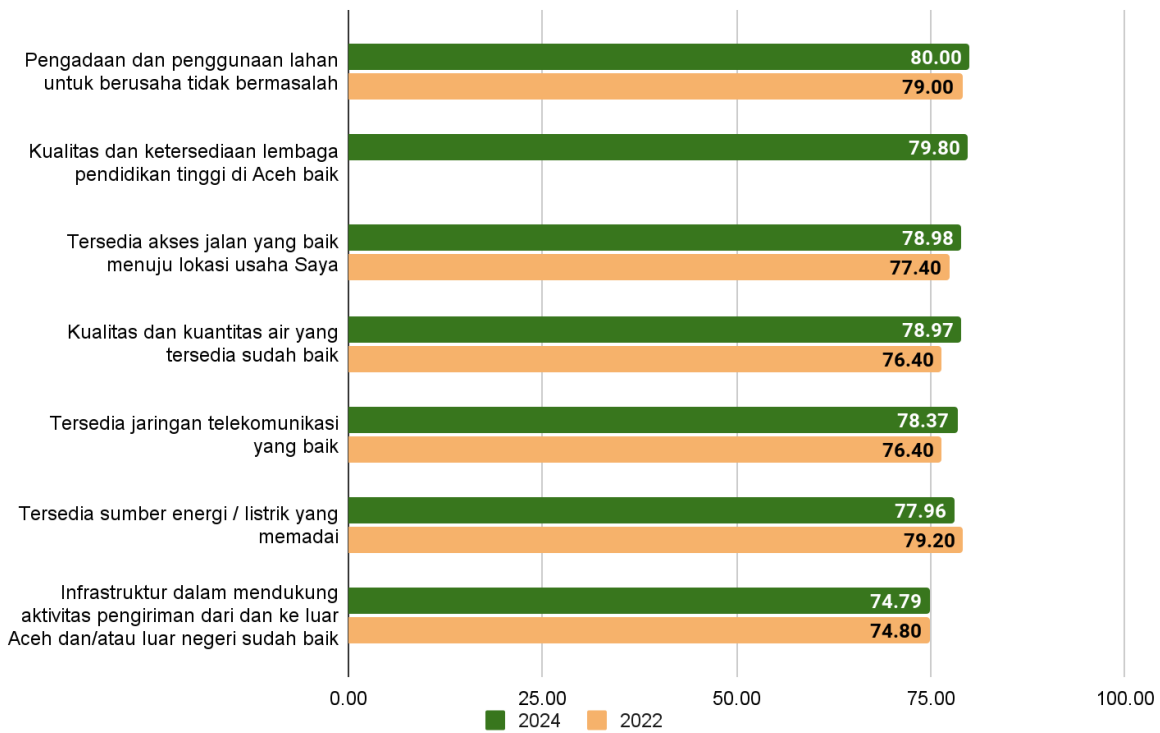
Sumber: Survei Persepsi Investor Aceh 2024, DPMPSTSP Aceh, 2024 (diolah)

**Gambar 4.9** Persepsi investor/pelaku usaha pada variabel masyarakat dan lingkungan sekitar

Indikator lain seperti dukungan masyarakat sekitar terhadap kegiatan usaha mengalami kenaikan masing-masing dari 78,60 menjadi 81,46. Hal ini mengindikasikan bahwa budaya lokal dan dukungan sosial semakin kondusif bagi dunia usaha di Aceh. Lingkungan bebas dari masalah akuisisi lahan juga meningkat dari 77,00 menjadi 80,83, mencerminkan penurunan hambatan terkait lahan.

Selanjutnya, indikator bebas dari isu sosial yang menghambat pengembangan usaha serta bebas dari pungutan liar (pungli) masing-masing mengalami peningkatan dari 75,60 menjadi 79,38 dan dari 75,60 menjadi 77,11. Peningkatan pada indikator-indikator ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam iklim investasi, dengan lingkungan sosial dan regulasi yang lebih mendukung. Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan juga mencatatkan kenaikan, menunjukkan bahwa perhatian terhadap isu lingkungan menjadi lebih tinggi di kalangan masyarakat sekitar usaha.

### Ketersediaan dan kualitas infrastruktur



Sumber: Survei Persepsi Investor Aceh 2024, DPMPTSP Aceh, 2024 (diolah)

**Gambar 4.10** Persepsi investor pada variabel ketersediaan dan kualitas infrastruktur

---

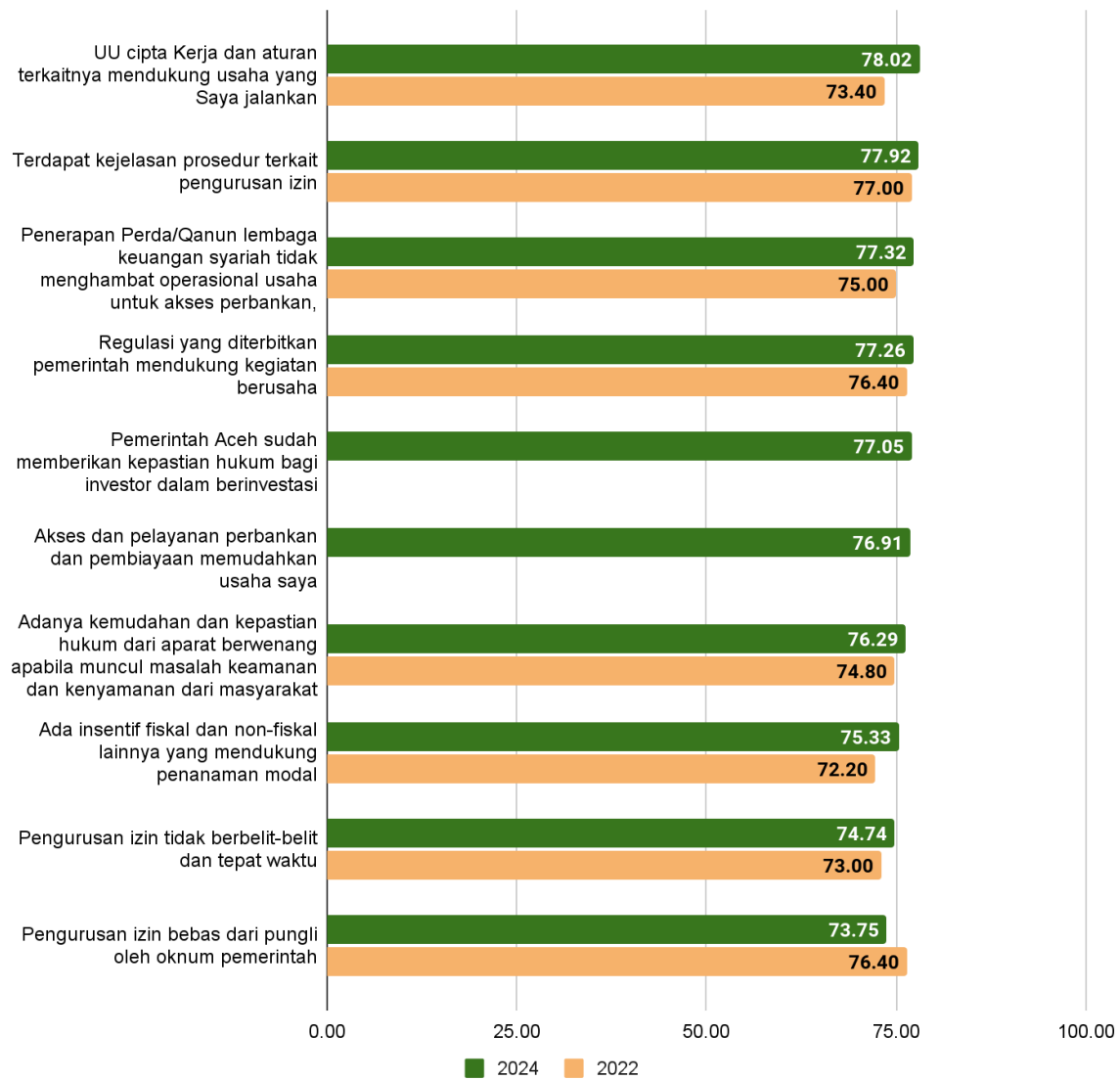
**Gambar 4.10** menunjukkan persepsi investor/pelaku usaha terhadap berbagai indikator infrastruktur dan sumber daya pendidikan. Sebagian besar indikator mengalami peningkatan antara tahun 2022 dan 2024. Indikator pengadaan dan penggunaan lahan untuk berusaha mencatat peningkatan dari 79,00 menjadi 80,00, menunjukkan kemudahan yang lebih baik dalam mengakses dan mengelola lahan untuk usaha. Peningkatan juga terlihat pada kualitas dan ketersediaan lembaga pendidikan tinggi di Aceh, yang naik dari 79,00 menjadi 79,80, serta akses jalan menuju lokasi usaha yang membaik dari 77,40 menjadi 78,98. Selain itu, kualitas dan kuantitas air yang tersedia mengalami kenaikan signifikan dari 76,40 menjadi 78,97, diikuti oleh jaringan telekomunikasi yang meningkat dari 76,40 menjadi 78,37, mencerminkan perbaikan dalam infrastruktur komunikasi.

Namun, indikator tersedianya sumber energi atau listrik mengalami sedikit penurunan dari 79,20 pada tahun 2022 menjadi 77,96 pada tahun 2024, menunjukkan adanya tantangan baru di sektor ini meskipun kondisinya masih memadai. Di sisi lain, infrastruktur yang mendukung aktivitas pengiriman dari dan ke luar Aceh tetap stabil, dengan nilai 74,80 pada tahun 2022 dan 74,79 pada tahun 2024, menunjukkan bahwa belum ada peningkatan signifikan di sektor ini. Secara keseluruhan, peningkatan pada sebagian besar indikator mencerminkan adanya upaya untuk memperbaiki infrastruktur dan sumber daya pendidikan guna mendukung aktivitas usaha di Aceh, meskipun masih ada beberapa tantangan yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

### Regulasi dan Administrasi Pemerintah

Berdasarkan **Gambar 4.11**, persepsi investor terhadap variabel regulasi dan administrasi pemerintah mengalami peningkatan pada hampir semua indikator antara tahun 2022 dan 2024. UU Cipta Kerja dan aturan terkaitnya mencatat kenaikan signifikan dari 73,40 menjadi 78,02. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi tersebut semakin dirasakan mendukung kegiatan usaha. Selain itu, kejelasan prosedur terkait pengurusan izin juga meningkat dari 77,00 menjadi 77,92, mencerminkan perbaikan dalam efisiensi proses administrasi.

Penerapan Perda/*Qanun* Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dianggap tidak menghambat operasional usaha. Hal ini ditunjukkan oleh kenaikan dari 75,00 menjadi 77,32 pada indikatornya, dan regulasi yang diterbitkan pemerintah untuk mendukung kegiatan berusaha meningkat dari 76,40 menjadi 77,26, yang menunjukkan dukungan pemerintah yang lebih baik terhadap dunia usaha.



Sumber: Survei Persepsi Investor Aceh 2024, DPMPTSP Aceh, 2024 (diolah)

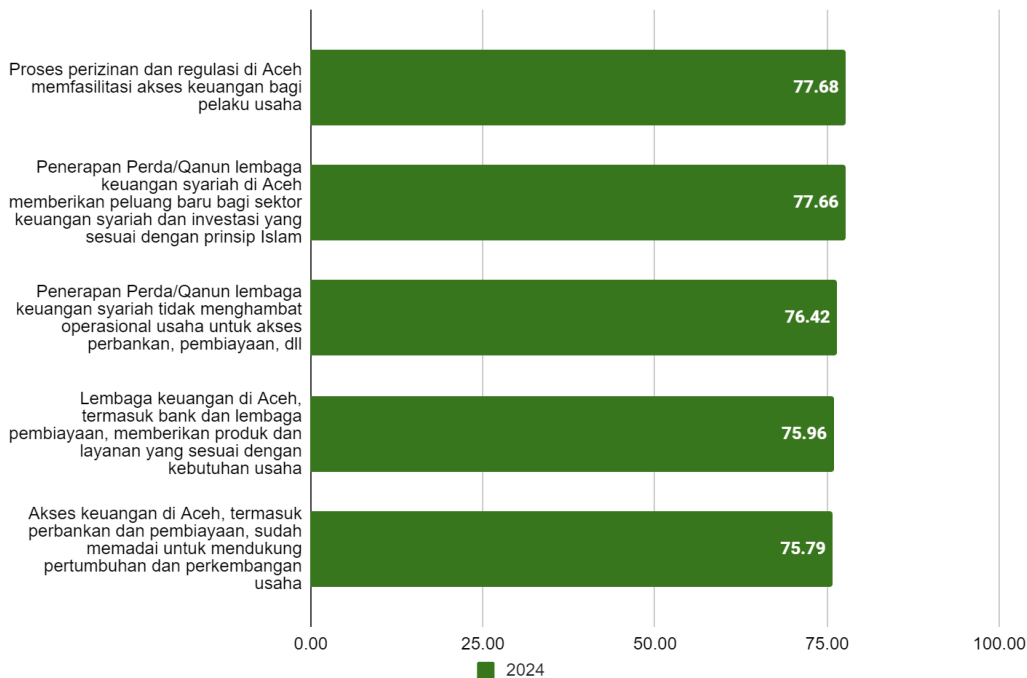
**Gambar 4.11** Persepsi investor pada variabel regulasi dan administrasi pemerintah

Kemudahan serta kepastian hukum dari aparat berwenang ketika muncul masalah keamanan naik dari 74,80 menjadi 76,29, yang mencerminkan peningkatan kepercayaan terhadap institusi keamanan. Insentif fiskal dan non-fiskal juga menunjukkan peningkatan dari 72,20 menjadi 75,33, mengindikasikan upaya pemerintah dalam mendukung investasi lebih lanjut.

Namun, beberapa indikator menunjukkan tren yang beragam. Pengurusan izin tidak berbelit-belit dan tepat waktu naik tipis dari 73,00 menjadi 74,74, tetapi pengurusan izin bebas dari pungutan liar (pungli) mengalami penurunan dari 76,40 menjadi 73,75. Secara keseluruhan, sebagian besar indikator menunjukkan perbaikan yang signifikan, namun beberapa aspek masih membutuhkan perhatian lebih lanjut untuk menciptakan regulasi dan administrasi pemerintah yang optimal bagi investor.

### Akses Keuangan

Berdasarkan **Gambar 4.12**, persepsi investor/pelaku usaha terhadap variabel akses keuangan di Aceh pada tahun 2024, yang diukur dengan lima indikator, menunjukkan nilai yang cukup baik. Proses perizinan dan regulasi di Aceh memiliki skor tertinggi sebesar 77,68, mencerminkan bahwa regulasi yang ada dinilai efektif dalam memfasilitasi akses keuangan bagi pelaku usaha. Penerapan Perda/Qanun lembaga keuangan syariah, yang memberikan peluang baru bagi sektor keuangan syariah dan investasi berbasis prinsip Islam, mendapat skor 77,66, menunjukkan bahwa regulasi ini diterima dengan cukup baik oleh pelaku usaha.



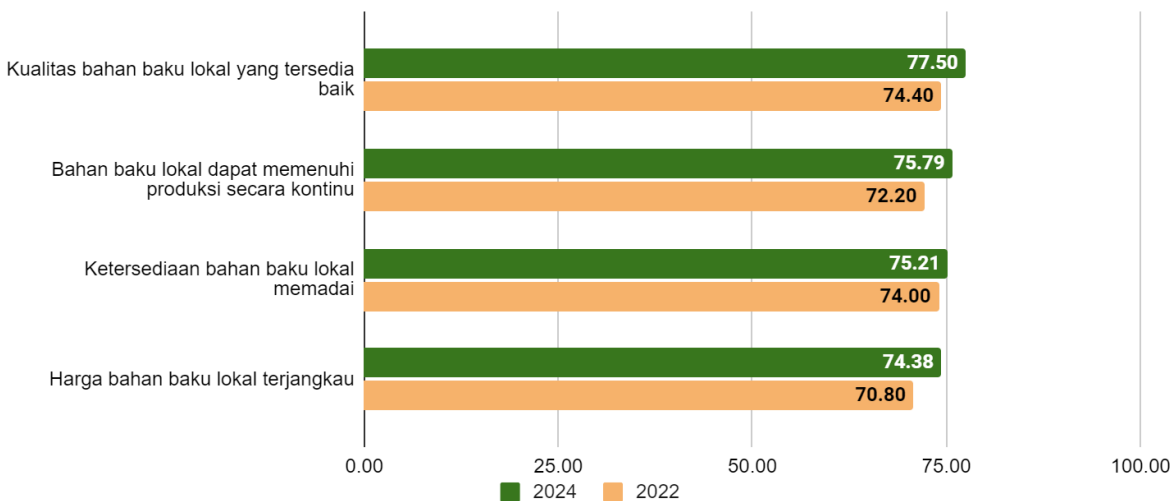
Sumber: Survei Persepsi Investor Aceh 2024, DPMPTSP Aceh, 2024 (diolah)

**Gambar 4.12** Persepsi investor pada variabel Akses Keuangan

Indikator lain, yaitu Penerapan Perda/Qanun lembaga keuangan syariah yang tidak menghambat operasional usaha, mendapatkan nilai 76,42, mencerminkan bahwa kebijakan tersebut secara umum tidak menjadi kendala dalam aktivitas usaha. Selain itu, lembaga keuangan di Aceh, termasuk bank dan lembaga pembiayaan, dinilai memberikan produk dan layanan yang cukup sesuai dengan kebutuhan usaha, dengan skor 75,96. Terakhir, akses keuangan di Aceh, termasuk perbankan dan pembiayaan, dianggap cukup memadai untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha, dengan skor 75,79.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa regulasi dan layanan keuangan di Aceh dinilai cukup mendukung aktivitas usaha, khususnya dalam mendorong sektor keuangan syariah sebagai salah satu ciri khas wilayah tersebut. Hal ini menggambarkan iklim investasi yang kondusif, terutama dalam aspek akses keuangan berbasis regulasi dan dukungan operasional. Namun karena dimensi ‘akses keuangan’ ini baru diukur pada tahun 2024, tidak ada perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya, terutama sejak *Qanun* LKS diberlakukan. Akan sangat menarik untuk melihat persepsi investor/pelaku usaha pada aspek ini di tahun-tahun mendatang.

### Ketersediaan dan penggunaan bahan baku lokal



Sumber: Survei Persepsi Investor Aceh 2024, DPMPTSP Aceh, 2024 (diolah)

**Gambar 4.13** Persepsi investor pada variabel ketersediaan dan penggunaan bahan baku lokal

**Gambar 4.13** menunjukkan persepsi investor terhadap variabel ketersediaan dan tingkat penggunaan bahan baku lokal. Semua indikator mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke 2024. Kualitas bahan baku lokal yang tersedia baik mencatat peningkatan dari 74,40 pada tahun 2022 menjadi 77,50 pada tahun 2024, menunjukkan bahwa kualitas bahan baku lokal semakin memenuhi ekspektasi para investor.

Bahan baku lokal yang dapat memenuhi produksi secara kontinu juga menunjukkan kenaikan dari 72,20 menjadi 75,79, mencerminkan peningkatan kepercayaan terhadap ketersediaan bahan baku secara berkelanjutan. Selain itu, ketersediaan bahan baku lokal yang memadai meningkat dari 74,00 menjadi 75,21, menandakan kemudahan akses yang semakin baik terhadap bahan baku lokal.

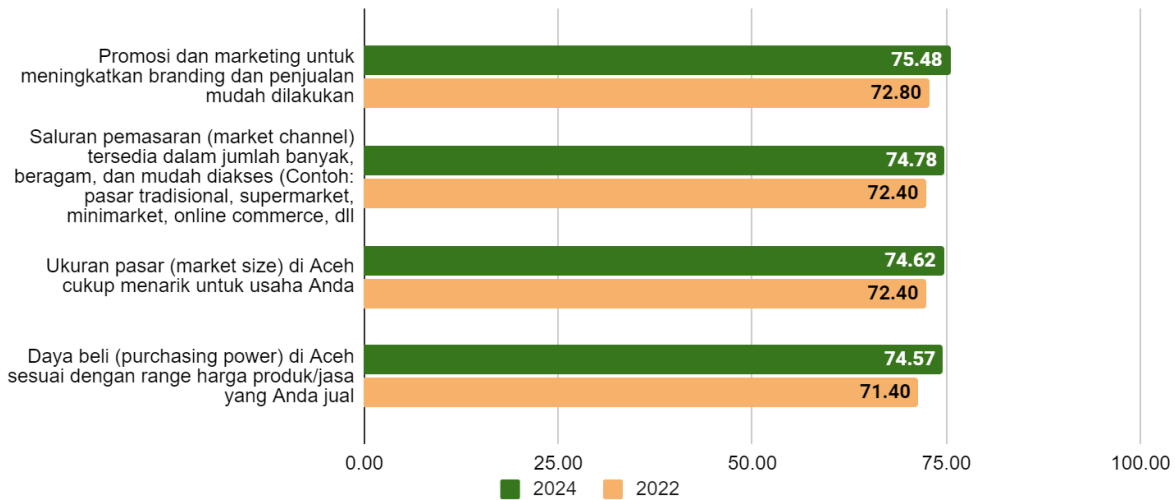
Harga bahan baku lokal yang terjangkau mengalami peningkatan dari 70,80 menjadi 74,38, yang menunjukkan perbaikan dalam aspek keterjangkauan biaya produksi. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan tren positif dalam variabel penggunaan bahan baku lokal, yang mencerminkan upaya pemerintah dan sektor usaha untuk meningkatkan kualitas, ketersediaan, kontinuitas, dan keterjangkauan bahan baku di Aceh. Hal ini menjadi faktor penting dalam menarik dan mempertahankan investasi di wilayah tersebut.

### Kondisi Pasar (*Market*)

Berdasarkan **Gambar 4.14**, yang menunjukkan persepsi investor terhadap variabel kondisi market di Aceh, terdapat peningkatan pada semua indikator antara tahun 2022 dan 2024. Promosi dan *marketing* untuk meningkatkan *branding* dan penjualan mudah dilakukan mencatat kenaikan dari 72,80 pada tahun 2022 menjadi 75,48 pada tahun 2024, mencerminkan adanya perbaikan dalam aksesibilitas pemasaran untuk bisnis.

Saluran pemasaran (*market channel*) yang tersedia dalam jumlah banyak dan mudah diakses, seperti pasar tradisional, supermarket, minimarket, dan *online/e-commerce*, juga mengalami peningkatan dari 72,40 menjadi 74,78, menunjukkan diversifikasi dan kemudahan akses saluran distribusi di Aceh.

Indikator ukuran pasar (*market size*) di Aceh yang cukup menarik untuk usaha naik dari 72,40 menjadi 74,62, menandakan bahwa investor melihat potensi pasar yang lebih besar dan menjanjikan di wilayah ini. Daya beli (*purchasing power*) masyarakat Aceh, yang sesuai dengan rentang harga produk atau jasa yang dijual, juga meningkat dari 71,40 menjadi 74,57, mencerminkan perbaikan daya beli dan kondisi ekonomi masyarakat lokal.



Sumber: Survei Persepsi Investor Aceh 2024, DPMPTSP Aceh, 2024 (diolah)

**Gambar 4.14** Persepsi investor pada variabel kondisi market/pasar di Aceh

Secara keseluruhan, peningkatan dalam variabel kondisi market menunjukkan bahwa iklim pasar di Aceh menjadi semakin menarik bagi investor, baik dari sisi promosi, distribusi, ukuran pasar, maupun daya beli masyarakat, sehingga memperkuat daya saing wilayah dalam menarik investasi.

### Perbandingan persepsi investor/pelaku usaha antar wilayah dan sektor usaha

Menarik juga untuk melihat perbandingan persepsi antar wilayah kabupaten/kota dan antar sektor berdasarkan variabel-variabel dalam analisis persepsi investor/pelaku usaha ini. Namun ini harus dilakukan dengan hati-hati karena tidak cukup memadainya jumlah sampel untuk setiap wilayah kabupaten/kota dan sektor. Diharapkan pada survei selanjutnya dapat diperoleh jumlah dan distribusi sampel yang lebih memadai untuk setiap wilayah dan sektor. Perlu juga dicatat, karena keterbatasan jumlah dan sebaran sampel pada survei 2022 dan 2024, ada wilayah dan sektor yang tidak terwakili sama sekali.

**Tabel 4.3** menunjukkan variasi persepsi investor/pelaku usaha berdasarkan masing-masing variabel (dimensi) dan rata-ratanya di masing-masing kabupaten/kota di Aceh. Dalam variabel Sumber Daya Manusia (SDM), Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Aceh Selatan mencatat skor

tinggi masing-masing 4,50 dan 5,00, menandakan persepsi tentang kualitas tenaga kerja yang baik dari investor/pelaku usaha di wilayah ini. Sebaliknya, Kota Langsa (2,96) dan Kota Sabang (2,75) menunjukkan skor rendah, mengindikasikan adanya persepsi tentang tantangan terkait kualitas atau ketersediaan SDM di kedua kota tersebut.

**Tabel 4.3** Hasil survei persepsi investor/pelaku usaha berdasarkan kabupaten/kota di Aceh, 2024

Wilayah usaha	N	Sumber Daya Manusia (SDM)	Masyarakat dan lingkungan sekitar	Ketersediaan dan kualitas infrastruktur	Regulasi dan Administrasi Pemerintah	Akses Keuangan	Penggunaan bahan baku lokal	Kondisi Market	Rata-rata
Kota Banda Aceh	16	76.52	84.58	78.57	75.21	74.00	69.33	77.81	76.57
Kab. Aceh Besar	16	77.79	82.81	81.25	74.47	76.53	78.44	74.29	77.94
Kota Lhokseumawe	7	83.21	81.43	81.22	80.00	82.00	77.14	77.86	80.41
Kab. Aceh Tamiang	7	77.86	80.71	78.03	84.29	83.43	74.29	75.00	79.09
Kab. Aceh Utara	6	77.92	80.00	75.24	80.67	80.00	75.83	73.33	77.57
Kota Langsa	5	65.00	64.00	60.00	61.20	64.80	68.00	61.00	63.43
Kab. Aceh Timur	5	80.50	87.50	86.29	82.63	80.00	84.00	82.00	83.27
Kab. Nagan Raya	4	78.75	83.13	78.57	81.25	80.00	82.50	80.00	80.60
Kab. Bireuen	4	83.75	85.83	84.29	83.50	80.00	85.00	85.00	83.91
Kab. Aceh Tengah	4	84.38	87.50	85.00	75.83	75.00	76.25	87.50	81.64
Kab. Aceh Singkil	4	65.63	61.88	58.14	62.50	66.67	66.25	55.00	62.29
Kab. Aceh Barat	4	78.75	83.13	85.00	81.50	81.00	77.50	80.00	80.98
Kab. Pidie	3	77.50	85.00	87.62	83.33	77.33	91.67	75.00	82.49
Kota Subulussalam	2	78.75	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	79.82
Kab. Simeulue	2	62.50	73.75	77.14	75.00	80.00	80.00	60.00	72.63
Kab. Gayo Lues	2	72.50	82.50	67.14	78.00	82.50	67.50	67.50	73.95
Kab. Bener Meriah	2	65.00	71.25	71.43	64.00	58.00	60.00	42.50	61.74
Kab. Aceh Tenggara	2	67.50	71.25	80.00	66.00	70.00	60.00	55.00	67.11
Kab. Aceh Jaya	2	88.75	80.00	84.29	81.00	88.00	90.00	90.00	86.01
Kota Sabang	1	55.00	72.50	80.00	76.00	80.00	80.00	80.00	74.79
<b>Aceh</b>	<b>98</b>	<b>76.67</b>	<b>80.57</b>	<b>78.38</b>	<b>76.53</b>	<b>76.89</b>	<b>75.77</b>	<b>74.95</b>	<b>76.31</b>

Sumber: Survei Persepsi Investor Aceh 2024, DPMPTSP Aceh, 2024 (diolah)

Di sektor Masyarakat dan Lingkungan Sekitar, yang mencakup keamanan dan kenyamanan, Kabupaten Aceh Selatan (5,00) serta Kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Timur (kedua-duanya 4,38) memperoleh persepsi tinggi, yang menunjukkan bahwa investor/pelaku merasa aman dan nyaman untuk berinvestasi di wilayah ini. Di sisi lain, Kota Langsa mencatat skor lebih rendah, yaitu 2,71.

Untuk infrastruktur, Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Selatan mendapatkan penilaian baik dengan skor 3,93 dan 5,00. Namun, Kota Langsa (2,86) dan Kabupaten Aceh Singkil (2,91) menunjukkan bahwa investor mungkin menghadapi kendala infrastruktur di wilayah tersebut. Dalam hal Regulasi dan Administrasi Pemerintah, Kabupaten Aceh Selatan (5,00) dan Kabupaten Aceh Tamiang (4,21) mencatat skor tinggi, menunjukkan bahwa proses administrasi mendukung investasi, sementara Kota Langsa mencatat skor terendah (2,70), yang mungkin menandakan adanya hambatan regulasi.

Pada sektor Akses Keuangan, Kota Lhokseumawe (4,10) dan Kabupaten Aceh Tamiang (4,17) mendapatkan nilai tinggi, sementara Kota Langsa memiliki skor rendah (2,70). Penggunaan Bahan Baku menunjukkan skor tertinggi di Kabupaten Aceh Selatan (5,00) dan Kabupaten Pidie (4,58), sementara Kota Langsa, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Aceh Tenggara semuanya mencatat skor terendah di 3,00. Terakhir, dalam sektor Kondisi Pasar, Kabupaten Aceh Selatan (5,00) dan Kabupaten Aceh Tengah (4,38) menunjukkan kondisi pasar yang mendukung aktivitas bisnis, sedangkan Kabupaten Bener Meriah memperoleh skor terendah dengan nilai 2,31.

Sementara itu, berdasarkan **Tabel 4.4** yang menunjukkan variasi kondisi investasi menurut sektor usaha, terlihat bahwa sektor konstruksi mencatatkan jumlah tertinggi dengan 19 responden, diikuti oleh jasa lainnya (16) dan sektor listrik, gas, dan air (10). Dalam hal kualitas Sumber Daya Manusia, sektor jasa lainnya memperoleh skor baik 3,83, sementara sektor konstruksi dan industri lain masing-masing memperoleh skor 3,76 dan 3,79. Dalam aspek Masyarakat dan Lingkungan, jasa lainnya menunjukkan skor tertinggi dengan 4,27, menandakan tingkat keamanan dan kenyamanan yang baik bagi investor, diikuti oleh sektor Listrik, Gas dan Air (4,18) dan sektor Hotel dan Restoran (4,19).

Ketersediaan infrastruktur juga terlihat memadai, dengan sektor pertambangan dan Transportasi, gudang dan telekomunikasi mendapatkan skor 4,14. Namun, sektor transportasi dan gudang hanya mencatat skor 3,38. Pada variabel regulasi dan administrasi pemerintah, sektor jasa lainnya (4,02) dan listrik, gas, dan air (4,05) menunjukkan proses yang mendukung investasi, sedangkan sektor industri tekstil mencatat skor terendah dengan 2,40. Dalam hal akses keuangan, sektor industri karet dan plastik menonjol dengan skor 5,00, menunjukkan akses yang sangat baik, sementara sektor makanan dan tekstil mencatatkan skor lebih rendah di 3,00 dan 3,43.

**Tabel 4.4** Hasil survei persepsi investor/pelaku usaha berdasarkan sektor usaha di Aceh, 2024

Wilayah usaha	N	Sumber Daya Manusia (SDM)	Masyarakat dan lingkungan sekitar	Ketersediaan dan kualitas infrastruktur	Regulasi dan Administrasi Pemerintah	Akses Keuangan	Penggunaan bahan baku lokal	Kondisi Market	Rata-rata
Konstruksi	21	75.12	78.21	76.19	74.76	75.24	75.71	72.86	75.44
Jasa Lainnya	19	76.32	84.47	79.70	75.89	76.22	75.00	71.94	77.08
Industri Lainnya	11	76.36	77.05	72.99	77.27	79.64	80.91	75.45	77.10
Listrik, Gas dan Air	9	78.33	80.28	77.59	74.37	71.13	71.11	78.57	75.91
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	8	76.56	79.06	81.13	82.25	83.00	74.38	75.00	78.77
Perikanan	7	78.52	76.07	77.55	79.93	73.71	67.14	72.14	75.01
Pertambangan	5	90.50	80.00	82.86	74.20	81.60	82.00	81.00	81.74
Hotel dan Restoran	5	67.50	83.00	82.29	80.00	84.00	80.00	73.00	78.54
Perdagangan dan Reparasi	4	73.57	78.33	77.14	77.50	71.00	73.33	80.00	75.84
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	2	70.00	76.61	81.43	79.67	80.00	85.00	80.00	78.96
Industri Kimia Dan Farmasi	2	80.00	92.50	92.86	80.00	80.00	82.50	80.00	83.98
Kehutanan	1	80.00	80.00	80.00	77.14	80.00	80.00	80.00	79.59
Industri Tekstil	1	75.00	100.00	68.57	48.00	72.00	30.00	90.00	69.08
Industri Mineral dan Non Logam	1	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	85.00	80.00	80.71
Industri Makanan	1	60.00	87.50	74.29	64.00	64.00	80.00	75.00	72.11
Industri Karet dan Plastik	1	100.00	97.50	88.57	82.00	80.00	100.00	80.00	89.72
<b>Aceh</b>	<b>98</b>	<b>76.67</b>	<b>80.57</b>	<b>78.38</b>	<b>76.53</b>	<b>76.89</b>	<b>75.77</b>	<b>74.95</b>	<b>78.10</b>

Sumber: Survei Persepsi Investor Aceh 2024, DPMPTSP Aceh, 2024 (diolah)

Penggunaan bahan baku juga diperhatikan, dengan sektor kehutanan dan industri mineral mencatatkan skor tertinggi. Terakhir, pada kondisi pasar, sektor industri karet dan plastik lagi-lagi menjadi yang terbaik dengan skor 5,00, sementara sektor hotel dan restoran serta sektor industri makanan menunjukkan skor yang lebih rendah. Secara keseluruhan, grand total dari tabel menunjukkan bahwa nilai rata-rata untuk setiap variabel adalah baik, namun masih ada sektor yang perlu diperbaiki untuk mendukung pertumbuhan investasi lebih lanjut.

---

# BAB V - KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI

## 5.1 Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil, terutama dari hasil Survei Persepsi Investor/Pelaku Usaha terhadap iklim investasi di Aceh adalah sebagai berikut:

### 1. Tren Positif Persepsi Investor

Hasil survei persepsi investor/pelaku usaha di Aceh menunjukkan peningkatan persepsi investor terhadap sebagian besar aspek iklim investasi di Aceh dari tahun 2022 ke 2024. Ini menunjukkan efektivitas kebijakan pemerintah dalam membangun lingkungan usaha yang lebih inklusif dan kompetitif.

### 2. Aspek Tertinggi dalam Persepsi

Variabel Masyarakat dan Lingkungan, Kualitas Infrastruktur, dan Regulasi Pemerintah memperoleh nilai tertinggi, mencerminkan perbaikan pada aspek sosial dan birokrasi investasi.

### 3. Tantangan Utama: SDM dan Akses Keuangan

Meski persepsi terhadap SDM stabil, indikator seperti etos kerja dan sertifikasi mengalami penurunan. Selain itu, akses keuangan tetap menjadi hambatan bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

### 4. Distribusi Investasi Tidak Merata

Investasi masih terkonsentrasi di Banda Aceh, Aceh Besar, dan Aceh Utara, menunjukkan perlunya strategi untuk mendorong investasi ke wilayah lain.

---

## 5. Aceh Kompetitif Secara Nasional

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Aceh (3,49) berada di atas rata-rata nasional (3,44), menduduki peringkat ke-11 dari 34 provinsi. Aceh unggul di aspek TIK, tenaga kerja, dan inovasi.

## 5.2 Saran

### 1. Revitalisasi Program Pelatihan SDM Lokal

Perlu terus dilakukan dan ditingkatkan upaya-upaya kolaborasi antara pemerintah daerah dan industri untuk pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri. Pendidikan dan pelatihan sedapat mungkin disatukan dengan upaya penerapan program sertifikasi keahlian di bidang unggulan (pertanian modern, energi, pengolahan hasil laut, dll).

### 2. Pemerataan Investasi antar Kabupaten/Kota

Penyusunan profil investasi daerah di luar Banda Aceh untuk promosi spesifik berbasis potensi lokal harus terus ditingkatkan. Provinsi Aceh dan kabupaten/kota bersangkutan dapat memberikan insentif tambahan untuk investor yang berinvestasi di wilayah dengan daya saing rendah.

### 3. Penguatan Peran UMKM dalam Rantai Pasok

Para pemangku kepentingan, terutama pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu meningkatkan upaya-upaya memfasilitasi investor/pelaku usaha agar dapat mengakses lembaga keuangan mikro dan koperasi modern. Perlu juga usaha-usaha untuk pembentukan kemitraan investasi antara pelaku besar dan UMKM lokal.

### 4. Digitalisasi dan Transparansi Layanan

Pemerintah Aceh dan para pemangku kepentingan investasi, lewat DPMPTSP, dapat mengembangkan *dashboard online* investasi Aceh yang menampilkan potensi, prosedur, progres perizinan, dan insentif secara *real time*. Juga perlu dilanjutkan dan dipelihara kualitas dan integritas digitalisasi proses perizinan melalui integrasi DPMPTSP dengan OSS pusat.

## 5.3 Rekomendasi

Bidang Strategis	Rekomendasi Aksi
<b>SDM &amp; Pendidikan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bangun Balai Latihan Kerja (BLK) sektor prioritas di kabupaten terpencil</li><li>- Integrasikan program “Magang Industri Aceh” untuk fresh graduate</li></ul>
<b>Infrastruktur Investasi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Selesaikan konektivitas jalan ke Kawasan Ekonomi Khusus Arun dan pelabuhan Sabang</li><li>- Prioritaskan pembangunan kawasan industri terpadu dengan akses logistik murah</li></ul>
<b>Reformasi Regulasi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Revisi perda investasi dengan mengakomodasi fleksibilitas PMA/PMDN</li><li>- Tetapkan SLA (Service Level Agreement) digital untuk seluruh proses izin</li></ul>
<b>Promosi Investasi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Buat <i>brand narrative</i> “Invest in Aceh Now” di platform internasional</li><li>- Partisipasi aktif di forum investasi ASEAN &amp; IMT-GT</li></ul>
<b>Akses Keuangan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gandeng perbankan syariah untuk pembiayaan investasi mikro</li><li>- Bentuk Dana Penjaminan Investasi Daerah (DPID)</li></ul>

Rekomendasi juga perlu ditujukan secara spesifik kepada para stakeholders investasi di Aceh, dibagi berdasarkan peran strategis masing-masing pihak, agar implementatif dan selaras dengan hasil *Laporan Persepsi Investasi 2024* ini. Berikut rekomendasinya:

### 1. Pemerintah Provinsi Aceh

#### Fokus: Tata Kelola, Regulasi, dan Koordinasi

- **Bangun Komite Investasi Daerah:** Forum lintas OPD untuk koordinasi regulasi, penyederhanaan izin, dan harmonisasi insentif.

- **Terapkan One-Stop Dashboard** berbasis data real-time: menampilkan peta potensi investasi, status izin, dan progres proyek.
- **Reformasi Perda Investasi:** Tinjau ulang aturan yang menghambat FDI dan buat klausul khusus untuk percepatan kawasan industri.

## 2. Pemerintah Kabupaten/Kota

### Fokus: Promosi Daerah dan Peningkatan Daya Saing Lokal

- **Kembangkan profil potensi investasi masing-masing daerah**, khususnya sektor unggulan (misal kopi di Bener Meriah, perikanan di Aceh Timur).
- **Bentuk Unit Layanan Investasi Lokal (ULIL)** di bawah DPMPTSP untuk respon cepat dan pendampingan investor.
- **Insentif lokasi spesifik:** potongan retribusi, prioritas konektivitas, atau keringanan pajak daerah untuk investor baru di wilayah rendah investasi.

## 3. Pelaku Usaha Besar dan PMDN/PMA

### Fokus: Kemitraan dan Transfer Teknologi

- **Bangun kemitraan dengan UMKM lokal** melalui skema *Inclusive Value Chain*.
- **Lakukan *technology sharing* dan pelatihan bersama** SDM lokal sebagai bagian dari CSR investasi.
- **Terapkan standar keberlanjutan dan pelaporan ESG (Environmental, Social, Governance)** sebagai keunggulan kompetitif jangka panjang.

## 4. Pelaku UMKM dan Koperasi

### Fokus: Kesiapan Menyambut Kemitraan

- **Ikut serta dalam pelatihan bersertifikasi** untuk siap menjadi mitra rantai pasok proyek investasi.
- **Gunakan skema pembiayaan syariah/UMKM yang disediakan pemerintah daerah atau mitra bank lokal.**
- **Gabung dalam asosiasi UMKM daerah** untuk meningkatkan posisi tawar dan akses pasar.

---

## 5. Lembaga Keuangan dan Perbankan

### Fokus: Akses Modal dan Inovasi Keuangan

- **Kembangkan produk pembiayaan investasi berbasis daerah** seperti kredit khusus agroindustri Aceh atau pariwisata halal.
- **Kerja sama dengan DPMPTSP** untuk identifikasi sektor potensial dan memberikan insentif bunga bagi sektor strategis.
- **Bentuk *credit guarantee scheme*** bersama pemerintah daerah untuk investasi UMKM berisiko rendah.

## 6. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

### Fokus: Link and Match Tenaga Kerja

- **Perkuat kurikulum berbasis kebutuhan investasi** daerah: sertifikasi energi terbarukan, agroindustri, hospitality.
- **Bangun pusat pelatihan industri** bekerja sama dengan kawasan ekonomi khusus (KEK) dan pelaku usaha.
- **Sediakan program magang & penempatan alumni** di proyek-proyek investasi yang sedang berjalan.

## 7. Media, Akademisi, dan Civil Society

### Fokus: Narasi Positif dan Advokasi Transparansi

- **Dorong pemberitaan positif dan edukatif** soal perkembangan investasi dan peluang kerja di Aceh.
- **Akademisi perlu aktif mengevaluasi dampak kebijakan investasi** dan memberi masukan berbasis bukti.
- **CSO** dapat memainkan peran pengawasan sosial terhadap dampak sosial dan lingkungan proyek investasi besar.

Rekomendasi ini diharapkan menjadi *panduan operasional kolaboratif*, bukan sekadar kebijakan satu arah. Keberhasilan investasi di Aceh tergantung pada kerja bersama, kepercayaan lintas sektor, dan kesiapan semua pihak dalam mengambil peran.



---

# Daftar Pustaka

- “10 Indonesian Cities With Fastest Internet Speed - Sci En.Tempo.Co.” Accessed December 12, 2022. <https://en.tempo.co/read/1503925/10-indonesian-cities-with-fastest-internet-speed>.
- “About Us- Asia Competitiveness Institute.” Accessed December 16, 2022. <https://lkyspp.nus.edu.sg/aci/about-us>.
- Aceh Asia Kapital. “Aceh Asia Kapital,” November 8, 2022. <https://asiakapital.com/>.
- Aceh, DPMPTSP. “Indek Daya Saing Investasi.” Accessed December 8, 2022. <https://dpmptsp.acehprov.go.id/halaman/indek-daya-saing-investasi>.
- . “Laporan Hambatan Investasi.” Accessed November 8, 2022. <https://dpmptsp.acehprov.go.id/halaman/laporan-hambatan-investasi>.
- . “Rencana Pengembangan Penanaman Modal Aceh 2023.” DPMPTSP Aceh, 2022.
- “Aceh, Indonesia’s Internet Speeds.” Accessed December 8, 2022. <https://www.speedtest.net/performance/indonesia/aceh>.
- Aceh, Invest in. “Invest in Aceh.” Accessed July 7, 2022. <https://investaceh.id>.
- “Aceh Investment Summit Digelar 12 Desember - Serambinews.Com.” Accessed November 8, 2022. <https://aceh.tribunnews.com/2012/11/14/aceh-investment-summit-digelar-12-desember>.
- Anonymous. “Improving Access to Finance in Aceh and North Sumatra.” Text. Asian Development Bank, November 21, 2012. Indonesia. <https://www.adb.org/projects/documents/indonesia-45266-001>.
- “Asia Competitiveness Institute (ACI)- Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP).” Accessed December 16, 2022. <https://lkyspp.nus.edu.sg/aci>.
- Bank, World. *Doing Business 2017: Equal Opportunity for All*. The World Bank, 2016.
- . “Investment Climate Assessment : Enterprises’ Perception in Post Revolution Tunisia,” February 2014. <http://hdl.handle.net/10986/19323>.
- . “Public Financial Managment in Aceh : Measuring Financial Management Performance in Aceh’s Local Governments,” March 2007. <http://hdl.handle.net/10986/7885>.
- Bestari, Novina Putri. “Amerika Resmi Resesi, Ini Dampaknya ke Ekonomi Indonesia.” CNBC Indonesia. Accessed December 15, 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220730102910-4-359792/amerika-resmi-resesi-ini-dampaknya-ke-ekonomi-indonesia>.
- Bhandari, Pritha. “What Is a Likert Scale? | Guide & Examples.” Scribbr, July 3, 2020.

- <https://www.scribbr.com/methodology/likert-scale/>.
- Bisnis.com. "Jumlah UMKM di Aceh Naik, Kualitas Stagnan | Sumatra Bisnis.com," June 28, 2018. <https://sumatra.bisnis.com/read/20180628/534/810401/jumlah-umkm-di-aceh-naik-kualitas-stagnan>.
- "BKPM Sampaikan 5 Keluhan Investor Yang Hambat Investasi Ke Indonesia." Accessed December 9, 2022. <https://nasional.kontan.co.id/news/bkpm-sampaikan-5-keluhan-investor-yang-hambat-investasi-ke-indonesia>.
- Fernandez, Manuel, and R. Joseph. "Foreign Direct Investment in Indonesia: An Analysis from Investors Perspective." *International Journal of Economics and Financial Issues* 10, no. 5 (2020): 102–12.
- Hamsa, Amrizal, and Ar Royyan Ramly. "Determinants of Financial Literacy on Micro Waqf Banks in Aceh." *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 11 (June 30, 2022): 229. <https://doi.org/10.22373/share.v11i1.12376>.
- <https://ptpema.co.id>. "PT PEMA." Accessed April 7, 2022. <https://ptpema.co.id>.
- IMF. "World Economic Outlook, October 2022: Countering the Cost-of-Living Crisis." Accessed December 14, 2022. <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022>.
- "Internet Speeds in Indonesia." Accessed December 28, 2022. <https://www.speedtest.net/performance/indonesia>.
- "Introduction to the Methods Used to Study Perception." Accessed December 18, 2022. [https://mind.ilstu.edu/curriculum/perception\\_intro/intro\\_to\\_methods\\_short.html](https://mind.ilstu.edu/curriculum/perception_intro/intro_to_methods_short.html).
- "Investment Policy Reviews | UNCTAD Investment Policy Hub." Accessed December 16, 2022. <https://investmentpolicy.unctad.org/investment-policy-review>.
- Kasali, Rhenald. "Manajemen Public Relations: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia." *Language* 31, no. 265p (2005): 28cm.
- "Kegiatan Utama - Pelindo." Accessed December 15, 2022. <https://pelindo.co.id/page/kegiatan-utama>.
- Kinda, Tidiane. "Investment Climate and FDI in Developing Countries: Firm-Level Evidence." *World Development* 38, no. 4 (April 1, 2010): 498–513. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2009.12.001>.
- luc. "Breaking: Pertumbuhan Ekonomi India Meroket 13,5%!" CNBC Indonesia. Accessed December 15, 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220831192436-4-368264/breaking-pertumbuhan-ekonomi-india-meroket-135>.
- Ménard, Claude, and Mary M. Shirley. *Handbook of New Institutional Economics*. Vol. 9. Springer, 2005.
- Mulyana, Dedy. "Ilmu Komunikasi, Pengantar." *Bandung: Remaja Rosdakarya*, 2000.
- "OECD Investment Policy Reviews: Indonesia 2020 | OECD Investment Policy Reviews | OECD

- ILibrary.” Accessed December 16, 2022. [https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-investment-policy-reviews-indonesia-2020\\_b56512da-en](https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-investment-policy-reviews-indonesia-2020_b56512da-en).
- “Pengamat: Eksploitasi Pesisir Aceh Belum Ramah Lingkungan - ANTARA News Aceh.” Accessed November 27, 2022. <https://aceh.antaranews.com/berita/22649/pengamat-eksploitasi-pesisir-aceh-belum-ramah-lingkungan>.
- “Pengusaha Sawit Ungkap Penyebab Harga TBS Petani Makin Anjlok.” Accessed December 11, 2022. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220622/12/1546876/pengusaha-sawit-ungkap-penyebab-harga-tbs-petani-makin-anjlok>.
- Putra, Guntur Kharisma. “Membakar Potensi Kopi Aceh,” August 14, 2017. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/aceh/id/data-dan-publikasi/artikel/2845-membakar-potensi-kopi-aceh.html>.
- Rakhmat, Jalaluddin. “Psikologi Komunikasi,” 2011.
- Redaksi. “OJK Aceh Sosialisasi Pasar Modal dan Perlindungan Konsumen dari Investasi Bodong.” *News Analisa* (blog), September 26, 2022. <https://newsanalisa.com/ojk-aceh-sosialisasi-pasar-modal-dan-perlindungan-konsumen-dari-investasi-bodong/>.
- Robins, Stephen P., and Timothy A. Judge. “Organizational Behavior.” *New Jersey, 9th Ed., Prentice-Hall Inc*, 2001.
- Shadur, Mark A., Rene Kienzle, and John J. Rodwell. “The Relationship between Organizational Climate and Employee Perceptions of Involvement: The Importance of Support.” *Group & Organization Management* 24, no. 4 (1999): 479–503.
- Simahatie, Mai, Marliyah Marliyah, and Zulkifli Yusuf. “Financial Literature And Interest Of Aceh People In Transactions In Sharia Financial Institutions Post Implementation Of Qanun Sharia Financial Institutions In Aceh.” *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 22 (July 13, 2021): 79–84. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i1.658>.
- Tan, Khee Giap, Mulya Amri, and Nurina Merdikawati. “A New Index to Measure Ease of Doing Business at the Sub-National Level: Empirical Findings from Indonesia.” *Cross Cultural & Strategic Management*, 2018.
- Tan, Khee Giap, Sasidaran Gopalan, and Jigyasa Sharma. *Annual Competitiveness Analysis and Impact Estimation of Exchange Rates on Exports from Sub-National Economies of India*. Asia Competitiveness Institute - World Scientific Series. WORLD SCIENTIFIC, 2019. <https://doi.org/10.1142/11490>.
- Tan, Khee Giap, Trieu Duong Luu Nguyen, Hui Yin Chuah, and Duy Nguyen. *2017 Annual Competitiveness Analysis and Impact of Exchange Rates on Foreign Direct Investment Inflows to ASEAN Economies*. Asia Competitiveness Institute - World Scientific Series. WORLD SCIENTIFIC, 2019. <https://doi.org/10.1142/11065>.
- “Tingkatkan Investasi Di Aceh, Mawardi Buka AGASID Tahun 2022 - BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA ACEH.” Accessed December 8, 2022.

- 
- <https://humas.acehprov.go.id/tingkatkan-investasi-di-aceh-mawardi-buka-agasid-tahun-2022/>.
- TrenAsia. “Pendanaan Terus Menurun Pada 2022, Inilah Kriteria Start Up yang Diminati Modal Ventura.” Accessed December 15, 2022. <https://www.trenasia.com/pendanaan-terus-menurun-pada-2022-inilah-kriteria-start-up-yang-diminati-modal-ventura>.
- “Tugas Dan Fungsi Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Ketapang.” Accessed December 15, 2022. <https://hubla.dephub.go.id/ksopketapang/page/tugas-dan-fungsi>.
- Ulinnuha, Muhammad, Diah Eko Susilowati, and Kharis Fadlullah Hana. “Persepsi Investor Pemula Terhadap Pembelian Saham Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2020): 1–14.
- Verywell Mind. “How Does Perception Work?” Accessed December 16, 2022. <https://www.verywellmind.com/perception-and-the-perceptual-process-2795839>.
- WALHI. “Aceh Bertaburan Masalah Lingkungan Hidup,” May 9, 2017. <https://www.walhi.or.id/aceh-bertaburan-masalah-lingkungan-hidup>.
- World Bank. “Alternative Existing Indicators.” Text/HTML. Accessed December 20, 2022. <https://www.worldbank.org/en/businessready/alternative-existing-indicators>.
- World Bank. “Business Regulations Across Indonesia.” Text/HTML. Accessed April 8, 2022. <https://subnational.doingbusiness.org/en/reports/subnational-reports/indonesia>.
- World Bank. “Investment Climate.” Text/HTML. Accessed December 16, 2022. <https://www.worldbank.org/en/topic/investment-climate>.
- World Bank. “Investment Competitiveness Diagnostics and Research.” Text/HTML. Accessed December 16, 2022. <https://www.worldbank.org/en/topic/investment-climate/brief/investment-competitiveness-diagnostics-and-research>.
- World Bank. “World Bank Group to Discontinue Doing Business Report.” Accessed April 8, 2023. <https://www.worldbank.org/en/news/statement/2021/09/16/world-bank-group-to-discontinue-doing-business-report>.
- Yahya, Azhari. “Foreign Direct Investment Inflow into Aceh Province of Indonesia After Peace Agreement.” In *Proceedings of MICoMS 2017*, 1:429–35. Emerald Reach Proceedings Series. Emerald Publishing Limited, 2018. <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-793-1-00067>.